

Laporan Kinerja **BPS Kabupaten Bandung** **2021**



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG

Laporan Kinerja
BPS Kabupaten Bandung
2021



LAPORAN KINERJA BPS Tahun 2021

No. Publikasi : 02130.2201

Katalog : 1202059

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xvi + 129 Halaman

Naskah : BPS Kabupaten Bandung

Gambar Kulit : BPS Kabupaten Bandung

Diterbitkan Oleh : © BPS Kabupaten Bandung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Agung Hartadi, S.ST., M.E

Penyusun

Ir. Wanwan Herawan

Ria Yunita Emkaen, S.Si., M.E

Leni Nurlina, S.ST

Adisty Septiyani, S.Si

Nurdianto Zaenuridin, S.Si., M.T

Dani Wildan Hakim, S.Si., M.E

Katamso Noto Santoso, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 BPS Kabupaten Bandung disusun untuk memberi gambaran sekaligus sebagai penyampaian informasi kinerja yang terukur mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung yang telah dan seharusnya dicapai. Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai suatu upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja.

Dalam menerapkan manajemen kinerja, salah satu fondasi utama adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Soreang, Januari 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung,



Agung Hartadi, SST, M.E.
NIP. 19750909 199403 1 001

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vii
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung	2
Sumber daya manusia (SDM) BPS Kabupaten Bandung	4
Potensi dan Permasalahan	14
Sistematika Penyajian Laporan.....	17
PERENCANAAN KINERJA.....	19
Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2020-2024	19
Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung 2020	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2021 Terhadap Target Perjanjian Kinerja 2021 ...	31
Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020–2021.....	43
Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Terhadap Target Renstra 2021-2024.....	49
Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021.....	57
Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	83
Kinerja Anggaran Tahun 2021	89
Penghargaan atas Prestasi yang diperoleh Tahun 2021	102
PENUTUP	104
Tinjauan Umum	104
Tindak Lanjut	105
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	106
Lampiran 1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2021-2024	106
Lampiran 2. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2021	108
Lampiran 3. Rincian SDM ASN BPS Kabupaten Bandung akhir 2021	111
Lampiran 4. Jadwal Kegiatan Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung 2021	112
Lampiran 5. Target–Realisasi Kegiatan/ <i>Response Rate</i> Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	118
Lampiran 6. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2021	122
Lampiran 7. Piagam Penghargaan yang diterima Tahun 2021	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum	5
Tabel 2	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Tingkat Pendidikan	8
Tabel 3	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur	11
Tabel 4	Daftar Mutasi Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	13
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung 2020-2024	24
Tabel 6	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	26
Tabel 7	Kontribusi Unit Eselon IV terhadap Penyusunan Target Indikator	28
Tabel 8	Jumlah Anggaran Menurut Program Kegiatan BPS Kabupaten Bandung 2021	30
Tabel 9	Capaian Kinerja Tujuan: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan	32
Tabel 10	Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN	36
Tabel 11	Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN	38
Tabel 12	Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	42
Tabel 13	Capaian Kinerja Tujuan: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan	43
Tabel 14	Capaian Indikator Sasaran: Persentase Pengguna Data Yang Menggunakan Data BPS Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Nasional	44
Tabel 15	Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN	46
Tabel 16	Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN	48
Tabel 17	Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	49
Tabel 18	Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra Tahun 2020-2024	54
Tabel 19	Daftar Sampel Segmen KSA Komoditas Padi BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	60
Tabel 20	Daftar Sampel Segmen KSA Komoditas Jagung BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	61
Tabel 21	Penyesuaian Jumlah Blok Sensus dan Kebutuhan Petugas Pra Pemutakhiran Long Form SP2020	68
Tabel 22	Target dan Realisasi Progres Lapangan LF SP2020	71

Tabel 23	Jumlah petugas Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial/ Survei Rumah Tangga Desember 2021 BPS Kabupaten Bandung	81
Tabel 24	Perbandingan Nilai Biaya Penggunaan/Langganan Listrik BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021	83
Tabel 25	Perbandingan Nilai Biaya Langganan Telpon per Tahun BPS Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021	84
Tabel 26	Rincian Revisi DIPA Anggaran Tahun 2021	85
Tabel 27	Perbandingan Pagu Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021	90
Tabel 28	Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2021 Menurut Program	91
Tabel 29	Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2020-2021 Menurut Program	91
Tabel 30	Realisasi Penyerapan Anggaran Program PPIS Menurut Rincian Output Kegiatan	92
Tabel 31	Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2021 Menurut Jenis Belanja	94
Tabel 32	Alokasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021 Menurut Sasaran Strategis	95
Tabel 33	Efisiensi Anggaran berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran terhadap Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	96
Tabel 34	Hasil Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	99
Tabel 35	Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPS Kabupaten Bandung	4
Gambar 2	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu Menurut Jenjang Jabatan Fungsional	6
Gambar 3	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jenis Kelamin	7
Gambar 4	Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Tingkat Pendidikan	9
Gambar 5	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang	10
Gambar 6	Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang	11
Gambar 7	Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur	12
Gambar 8	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung	25
Gambar 9	Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2021	33
Gambar 10	Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Bandung yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan	34 47
Gambar 11	Persentase Target - Realisasi Tujuan: Persentase K/L/D/I yang Menyampaikan Metadata Sektoral dan Khusus Sesuai Standar	33
Gambar 12	Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	63
Gambar 13	Perkembangan Luas Panen Padi KSA Kabupaten Bandung Tahun 2021 (Hektar)	63
Gambar 14	Perkembangan Produksi Padi (GKG) di Kabupaten Bandung Tahun 2021 (Ton)	64
Gambar 15	Perkembangan Produksi Beras di Kabupaten Bandung Tahun 2021 (Ton)	65
Gambar 16	Dokumentasi Briefing Petugas Pra Pemutakhiran Long Form SP2020	70
Gambar 17	Dokumentasi Kegiatan Survei Efektivitas Bantuan Sosial (SEPBS) 2021	79
Gambar 18	Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	88
Gambar 19	Komposisi Alokasi Anggaran menurut Jenis Belanja terhadap Total Pagu BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	93
Gambar 20	Komposisi Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	94
Gambar 21	Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021	99

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Bandung membutuhkan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaannya. Guna mendukung hal tersebut BPS Kabupaten Bandung melakukan penyusunan perencanaan strategis untuk lima tahun, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 BPS Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2021-2024. Sebagai catatan, tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2020-2024 BPS Kabupaten Bandung.

Dalam Renstra tersebut terdapat 4 (empat) tujuan strategis yang harus dicapai BPS pada tahun 2021 yaitu: (1) Penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan; (2) Peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); (3) Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPS Kabupaten Bandung menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang merupakan gambaran kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan kinerja pencapaian target sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021 yang ditetapkan setiap awal tahun.

Maksud dan Tujuan

Selain untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maksud penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Bandung atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama tahun 2021.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung merupakan lembaga non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah dibentuk Instansi vertikal BPS yang terdiri atas: BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, kedudukan BPS Kabupaten diatur sebagai berikut:

- (1) BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
- (2) BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas

BPS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kabupaten Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS kabupaten.

Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, yaitu :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Bandung

Sumber Daya manusia (SDM) BPS Kabupaten Bandung

Dalam menunjang kegiatannya, BPS Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Pejabat Administrator/Eselon III yang membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian/pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan kegiatan statistik dasar, Kepala BPS Kabupaten Bandung dibantu oleh beberapa orang pejabat fungsional dari kelompok jabatan fungsional tersebut, yang ditunjuk sebagai Koordinator Fungsi Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Fungsi Statistik Sosial
2. Koordinator Fungsi Statistik Produksi
3. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi
4. Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analiis Statistik
5. Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Pada tahun 2021, dari total pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPS Kabupaten Bandung sebanyak 34 orang, jika dibagi berdasarkan Jabatan Pegawai adalah terdiri dari Pejabat struktural sebanyak 2 orang (5.88%), Pejabat Fungsional sebanyak 27 orang (79.41%) dan Pejabat fungsional umum/staf pelaksana sebanyak 5 orang pegawai (14.71%). Selain pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, di BPS Kabupaten Bandung masih terdapat 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau Honorer yang difungsikan sebagai tenaga Pramubakti dan Satuan Pengamanan kantor.

Tabel 1. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

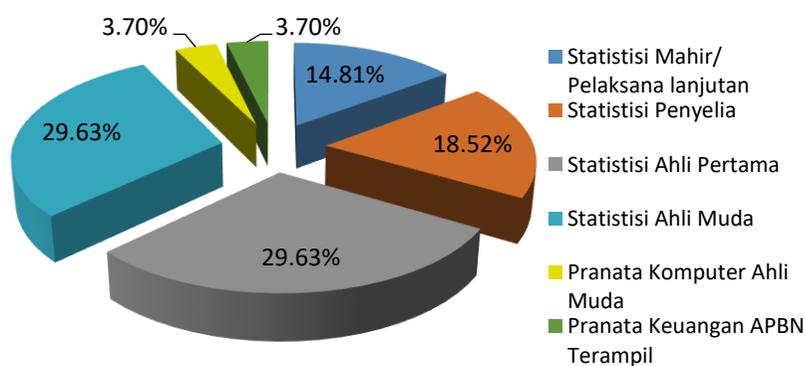
No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase terhadap jumlah ASN (%)
1	Pejabat Administrator/Eselon III	1	2.94
2	Pejabat Pengawas/Eselon IV	1	2.94
3	Pejabat Fungsional :	27	79.41
-	<i>Statistisi Terampil/ Pelaksana</i>	0	0
-	<i>Statistisi Mahir/ Pelaksana lanjutan</i>	4	11.76
-	<i>Statistisi Penyelia</i>	5	14.71
-	<i>Statistisi Ahli Pertama</i>	8	23.53
-	<i>Statistisi Ahli Muda</i>	8	23.53
-	<i>Pranata Komputer Ahli Muda</i>	1	2.94
-	<i>Pranata Keuangan APBN Terampil</i>	1	2.94
4	Pejabat Fungsional Umum/ Staf Pelaksana	5	14.71

Pada kelompok Pejabat Fungsional Umum (Staf Pelaksana) terdapat 3 orang yang belum masuk ke dalam jabatan fungsional tertentu dan 2 orang pegawai Pejabat Fungsional Tertentu yang dibebaskan sementara dari Jabatan statistisinya karena ditempatkan di

Subbagian Umum (Statistisi Pelaksana) dan sedang menjalani Tugas Belajar S-2 (Statistisi Ahli Pertama).

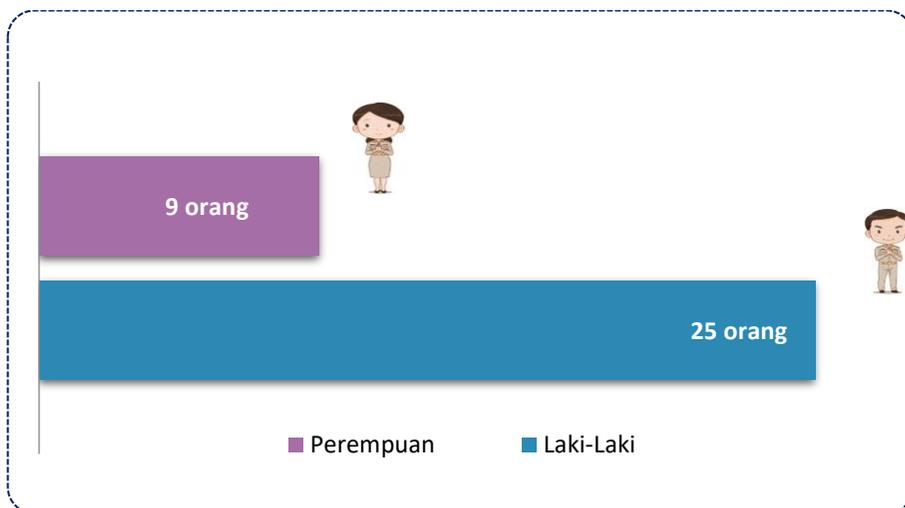
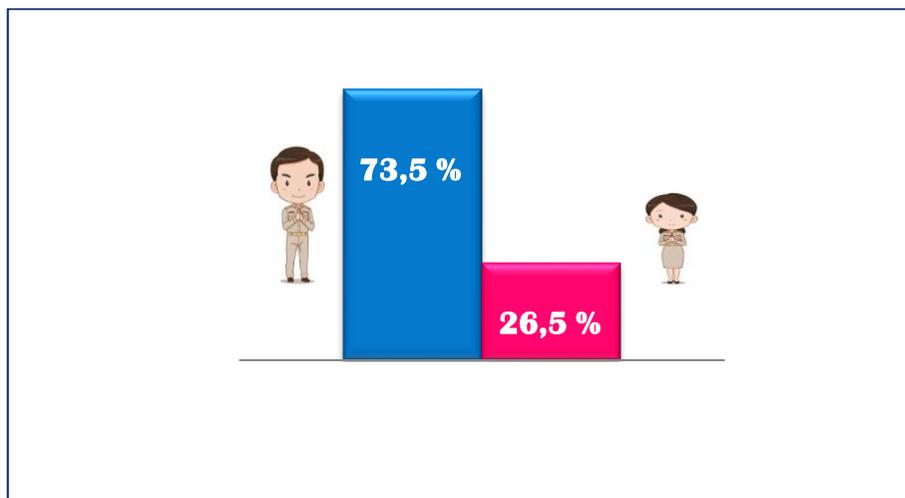
Jumlah pegawai yang menjabat dalam Jabatan Fungsional tertentu di BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, disebabkan karena adanya Penyetaraan Jabatan Fungsional tertentu dari pejabat struktural Eselon IV (5 orang kepala seksi), serta adanya Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional Statistisi dan Pranata Keuangan APBN. Selain peningkatan jumlah pegawai dalam jabatan fungsional tertentu, pada tahun 2021 terdapat juga penambahan 2 jenis fungsional tertentu, yaitu Fungsional Pranata Komputer dan Pranata Keuangan APBN.

Secara komposisi dalam setiap jenjang jabatan fungsional tertentu juga terjadi perubahan dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya penyetaran jabatan, kenaikan jabatan dan pengangkatan dalam jabatan. Komposisi 27 orang Pejabat Fungsional Tertentu tersebut terdiri dari 4 orang pegawai (14.81%) Statistisi Mahir/Pelaksana Lanjutan, 5 orang pegawai (18.52%) Statistisi Penyelia, 8 orang pegawai (29.63%) Statistisi Ahli Pertama, 8 orang Pegawai (29.63%) Statistisi Ahli Muda, 1 orang pegawai (3.70%) Pranata Komputer Ahli Muda dan 1 orang (3.70%) merupakan fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil .



Gambar 2. Persentase Pejabat Fungsional Tertentu Menurut Jenjang Jabatan Fungsional

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu sebanyak 25 orang pegawai atau sebesar 73,5% dari total 34 orang pegawai. Sementara itu pegawai perempuan tercatat sebanyak 9 orang pegawai atau sebesar 26,5% persen dari total seluruh pegawai.



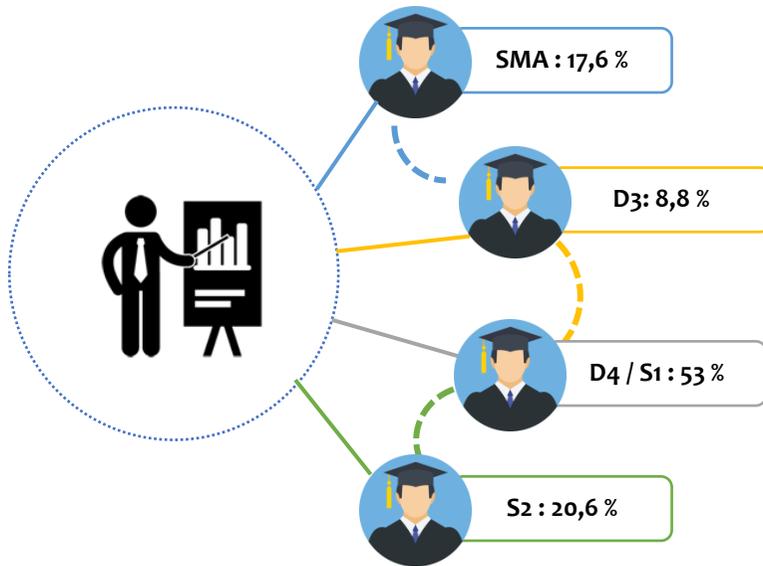
Gambar 3. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jenis Kelamin

Ditinjau dari tingkat pendidikan pada Tahun 2021, sebagian besar pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Sebanyak 7 orang pegawai (20,6%) berlatar belakang pendidikan magister (S-2), 18 orang pegawai (53%) dengan tingkat pendidikan sarjana atau Diploma IV (DIV/S-1), 3 orang pegawai (8,8%) dengan tingkat pendidikan Diploma-3 (D-III), serta 6 orang pegawai (17,6%) berpendidikan SMA.

Tabel 2. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang) Tahun 2021	Jumlah (orang) Tahun 2020
1	SMA	6	7
2	D III	3	3
3	D-IV / S-1	18	18
4	S-2	7	6
Jumlah		34	34

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 ini tidak ada perubahan untuk jumlah total pegawai menurut tingkat pendidikan yaitu berjumlah 34 orang. Akan tetapi terjadi pergeseran jumlah untuk beberapa Tingkatan Pendidikan pada tahun 2021. Untuk Tingkat Pendidikan SMA pada tahun 2021 berjumlah 7 orang dan pada tahun 2020 berjumlah 6 orang, pengurangan ini terjadi dikarenakan terdapat 1 orang pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan S-1 dan mendapat persetujuan penyesuaian Gelar dan Pendidikan atas nama Indra, S.A.P. Selain itu terjadi pula peningkatan jumlah pada Tingkatan Pendidikan S-2 pada tahun 2021 berjumlah 6 orang dan pada tahun 2020 berjumlah 7 orang, ini terjadi dikarenakan terdapat 1 orang pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan S-2 dan mendapat persetujuan penyesuaian Gelar dan Pendidikan atas nama Dani Wildan Hakim, S.Si.,M.E.



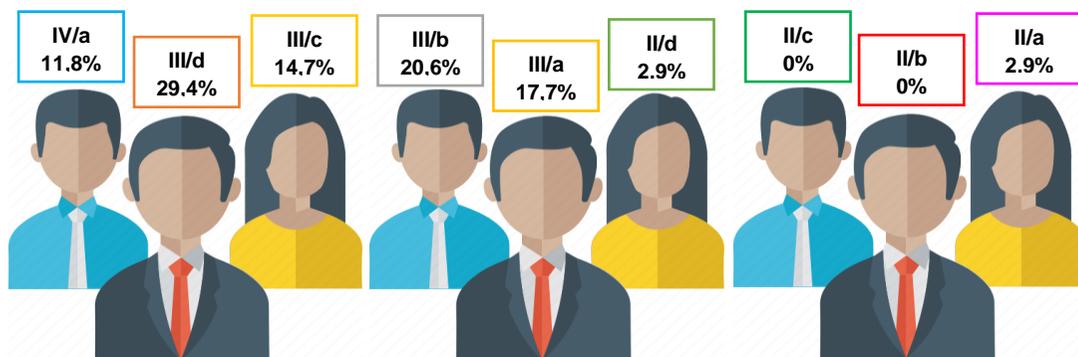
Gambar 4. Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai BPS Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dan ruang, yaitu Pegawai Golongan IV berjumlah 4 orang terdiri dari Pembina (IV/a) sebanyak 4 orang pegawai. Sedangkan Pegawai Golongan III terdapat sebanyak 28 orang yang terdiri dari : Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 10 orang, Penata (III/c) sebanyak 5 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 7 orang dan Penata Muda (III/a) sebanyak 6 orang pegawai. Adapun untuk Pegawai Golongan II sebanyak 2 orang, dengan rincian : Pengatur Tingkat I (II/d) sebanyak 1 orang dan Pengatur Muda (II/a) Sebanyak 1 orang.



Gambar 5. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang

Berdasarkan komposisi tersebut terlihat bahwa pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dan pangkat Penata Tingkat I (III/d) merupakan pangkat/golongan ruang dengan jumlah pegawai terbanyak di BPS Kabupaten Bandung yaitu masing-masing sebesar 20,6% dan 29,4%, disusul dengan Penata (III/a) dan Penata Muda (III/c) yaitu masing-masing sebanyak 17,7 % dan 14,7%, Pembina (IV/a) sebanyak 11,8% dan Pengatur Tingkat I (II/d) dan Pengatur Muda (II/a) yaitu sebesar 2,9 %. Dibandingkan dengan tahun lalu Jumlah ASN dengan golongan ruang IV/a bertambah 1 orang, golongan ruang III/d bertambah 1 orang dan golongan III/a bertambah 1 orang dikarenakan adanya kenaikan pangkat/golongan tahun ini. Sedangkan untuk golongan ruang III/b terjadi pengurangan 2 orang dan golongan II/d terjadi pengurangan 1 orang dikarenakan adanya kenaikan pangkat/golongan menjadi III/c dan III/a.



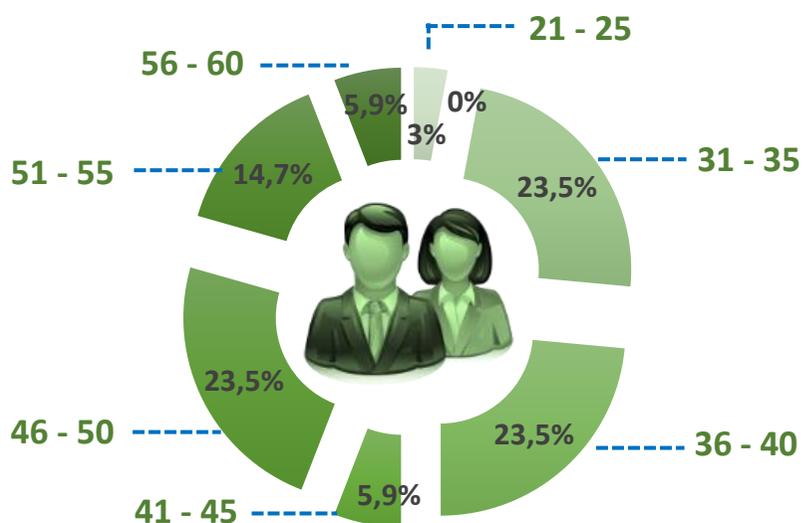
Gambar 6. Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, untuk pegawai menurut kelompok umur di lingkungan BPS Kabupaten Bandung terbanyak berada pada kelompok umur 31-35 tahun, 36-40 tahun dan 46-50 tahun yaitu masing-masing sebanyak 8 orang atau 23,5% dari total pegawai, diikuti oleh kelompok umur 51-55 tahun sebanyak 5 orang atau 14,7%, kelompok umur 41-45 tahun dan 56-60 tahun yaitu masing-masing sebanyak 2 orang atau sebesar 5,9% dan kelompok umur 21-25 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau 3%.

Tabel 3. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	21-25	1	-	1
2	26-30	-	-	-
3	31-35	3	5	8
4	36-40	6	2	8
5	41-45	2	-	2
6	46-50	6	2	8
7	51-55	5	-	5
8	56-60	2	-	2
Jumlah		25	9	34

Secara keseluruhan sebagian besar pegawai BPS Kabupaten Bandung berada pada kelompok umur di bawah 50 tahun yaitu sebanyak 27 orang atau sebesar 79,4 %. Jika dilihat dari Struktur Umur berdasarkan Generasi maka di BPS Kabupaten Bandung didominasi oleh Generasi Milenial (lahir tahun 1981–1996 atau perkiraan usia sekarang 25-40 tahun) yaitu sebanyak 16 orang, diikuti oleh Generasi X (lahir tahun 1965–1980 atau perkiraan usia sekarang 41-56 tahun) yaitu sebanyak 15 orang, Generasi *Baby Boomer* (lahir tahun 1946–1964 atau perkiraan usia sekarang 57-75 tahun) yaitu sebanyak 2 orang dan Generasi Z (lahir tahun 1997–2012 atau perkiraan usia sekarang 9-24 tahun) yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini menjadi potensi SDM yang menggembirakan karena secara fisik relatif muda sehingga memiliki potensi yang besar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja satker BPS Kabupaten Bandung.



Gambar 7. Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur

Pada awal tahun sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat pegawai di BPS Kabupaten Bandung yang mengalami mutasi, baik mutasi kenaikan Pangkat dan Golongan maupun mutasi kenaikan jabatan Fungsional. Rincian para pegawai yang mengalami mutasi secara lengkap seperti pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Daftar Mutasi Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

No	Nama	N I P	Jabatan lama / Pangkat Gol. Lama	Jabatan Baru / Pangkat Gol. Baru	T M T	
1	Ribut Sumaryanto, SAP	196612121989031005	Statistisi Penyelia Seksi Statistik Sosial	Statistisi Penyelia Seksi Statistik Produksi	01/01/2021	
2	Indra, SAP	198204072006041010	Koordinator Statistik Kecamatan Majalaya	Koordinator Statistik Kecamatan Margahayu	01/01/2021	
3	Cucu Hamzah Kurniadi SAP	196903171994031002	Fungsional Umum KSK Cileunyi	Statistisi Muda KSK Cileunyi	01/03/2021	
4	Dani Wildan Hakim S.Si, M.E	198211162011011013	Fungsional Umum KSK Paseh	Pengaktifan kembali setelah menjadi Statistisi Pertama Paseh	JFT TB KSK	17/03/2021
5	Rahmat Burhani S.Sos	198507042006041003	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	01/04/2021	
6	Deni Riyadi SST, M.A.P.	197503051998031003	Penata Tingkat I (III/d)	Pembina (IV/a)	01/04/2021	
7	Ria Yunita Emkaen S.Si., ME.	198206022009022008	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	01/04/2021	
8	Indra, SAP	198204072006041010	Pengatur Tingkat I (II/d)	Penata Muda (III/a)	01/04/2021	
9	Cucu Hamzah Kurniadi SAP	196903171994031002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)	01/04/2021	
10	Syifa Insani S.Si.	198812032011012010	Fungsional Umum KSK Banjaran	Statistisi Muda KSK Banjaran	01/04/2021	
11	Boyke	198310112008011008	Fungsional Umum Subbagian Umum	Pranata Keuangan APBN Terampil Subbagian Umum	06/04/2021	
12	Jumadi S.Si	197610222011011002	Statistisi Pertama KSK Dayeuhkolot	Statistisi Muda KSK Dayeuhkolot	01/05/2021	
13	Katamso Noto Santoso, S.Tr.Stat.	199705272019121003	Staf Fungsional Umum Seksi Statistik Sosial	Statistisi Pertama Seksi Statistik Sosial	01/09/2021	
14	Jumadi S.Si	197610222011011002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)	01/10/2021	

Potensi dan Permasalahan

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 1.762,4 km², jumlah kecamatan sebanyak 31 kecamatan dan jumlah penduduk sebanyak 3.623.790 jiwa (Hasil SP2020). Dengan luas dan jumlah penduduk yang besar ini, merupakan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan perstatistikan di BPS Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik RI Nomor 281 tahun 2021 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik, Formasi Jabatan Pegawai BPS Kabupaten Bandung yang dibutuhkan adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan orang) dengan rincian 1 orang pegawai fungsi administrator, 1 orang pengawas fungsi umum, 10 orang pegawai pelaksana fungsi umum dan 47 orang pegawai pelaksana fungsi Teknis Statistik. Disisi lain jumlah pegawai yang ada (eksisting) tahun 2021 ini adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang pegawai yang terdiri dari 1 orang pegawai fungsi administrator, 1 orang pengawas fungsi umum, 4 orang pegawai pelaksana fungsi umum dan 28 orang pegawai pelaksana fungsi Teknis Statistik. Hal tersebut berarti masih terdapat formasi kebutuhan Pegawai BPS Kabupaten Bandung sebanyak 25 orang pegawai, dengan rincian kekurangan 6 orang pegawai pada fungsi umum dan 19 orang fungsi teknis statistik.

Pegawai Teknis pelaksana lapangan yang dikenal dengan istilah sebelumnya sebagai Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), merupakan ujung tombak dalam setiap kegiatan pendataan atau pencacahan lapangan di BPS Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 13 (tiga belas) KSK aktif lapangan. Jumlah ini hanya dapat memenuhi sebagian dari total 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Kabupaten Bandung. Karena kebutuhan tersebut, beberapa KSK kemudian mengemban jabatan rangkap lebih dari satu kecamatan. Selain itu kekurangan KSK sebagai koordinator pada tingkat kecamatan disiasati dengan pengangkatan beberapa pegawai staf pelaksana yang ada, ditambah dengan beberapa orang Mitra Statistik Kecamatan yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana KSK di lapangan. Dengan strategi yang dijalankan didukung dengan semangat *sabilulungan*

maka kegiatan-kegiatan besar di BPS Kabupaten Bandung relatif dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu potensi yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Bandung adalah kualitas SDM nya yang cukup baik, dimana sebagian besar pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi, ditambah dengan modal sosial etos kerja bersama-sama.

Pada tahun 2021 ini, dunia masih dilanda pandemi Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh virus Sars-Cov-2. Sejatinya sebagian besar aktivitas penduduk dibatasi ruang geraknya di berbagai sektor tidak terkecuali sektor jasa pemerintahan. Pada masa awal wabah ini masuk ke Indonesia, kegiatan perkantoran dibatasi termasuk kegiatan perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Pemerintah pun memberlakukan aturan bekerja di rumah atau yang dikenal dengan istilah *Work From Home* (WFH) untuk pegawai dengan mengikuti kaidah yang berlaku.

Beberapa target kegiatan ada yang dikurangi atau bahkan dihentikan oleh BPS RI. Namun demikian meskipun ada penerapan aturan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO), dengan semangat sabilulungan seluruh target pekerjaan dapat diselesaikan dengan cukup baik. Berbagai macam modifikasi cara/metode pengumpulan data dilakukan seperti via telpon, WA, internet dan lain-lain

Pada tahun 2021 ini juga merupakan tahun yang istimewa dimana masih berlangsung agenda besar sepuluh tahunan yaitu Sensus Penduduk Lanjutan masih dilaksanakan di tahun ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pandemi masih terus melanda. Hajat besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan matang menjadi terkendala. Namun demikian, pada akhirnya kegiatan Sensus Penduduk lanjutan atau yang lebih dikenal dengan SP2020 Long Form 2021 tetap terlaksana dengan strategi dan teknis yang sudah diatur sedemikian rupa oleh BPS RI menyesuaikan dengan kondisi pandemi serta tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan lapangannya.

Di samping kegiatan besar Sensus Penduduk 2020 *Long Form*, berbagai kegiatan rutin lainnya pun cukup banyak baik bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan. Target pencacahan dan pemasukan dokumen berbagai kegiatan di BPS Kabupaten Bandung semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan penggunaan data BPS Kabupaten Bandung yang semakin dibutuhkan oleh berbagai pihak. Di sisi lain, responden semakin enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus atau survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung, menjadi salah satu kendala dalam memperoleh data yang berkualitas. Apalagi di masa pandemi ini, respon masyarakat, pelaku usaha dan lainnya sebagai responden sensus/survei di BPS menjadi menurun. Hal ini dimaklumi karena responden tidak bersedia menerima kedatangan petugas dimana ada ketakutan menjadi perantara menularnya wabah virus corona. Meskipun demikian, responden juga ada yang cukup responsif menerima kedatangan petugas selama petugas pencacah menjalankan tugas sesuai aturan protokol kesehatan.

Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. Untuk menyiasati hal ini BPS Kabupaten Bandung gencar melakukan sosialisasi, harapannya agar masyarakat lebih mengenal BPS Kabupaten Bandung, sehingga ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS Kabupaten Bandung lebih kooperatif dalam memberikan jawaban apa adanya.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi pembinaan dan koordinasi di bidang statistik dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia, BPS Kabupaten Bandung telah menandatangani Perjanjian Kerjasama bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (Diskominfo) Kabupaten Bandung, dengan Judul Kerjasama : ***Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka mewujudkan Satu Data*** pada tanggal 16 Februari 2021 dengan No PKS : Nomor 480/120 Diskominfo dan Nomor B-047/BPS/3204/02/2021 dan Penandatanganan Nota kesepahaman bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung (Bupati Bandung) tentang ***Penyusunan Statistik*** pada tanggal 4 Mei 2021 dengan Nomor MOU 119/010-Ksm/2021 dan B-119.1/BPS/3204/05/2021. Adanya payung hukum ini kemudian menjadi salah satu

kekuatan (*strength*) yang dimiliki BPS Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan terutama hubungannya terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kabupaten Bandung disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten Bandung; sumber daya manusia di BPS Kabupaten Bandung, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Bandung; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung tahun 2021.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

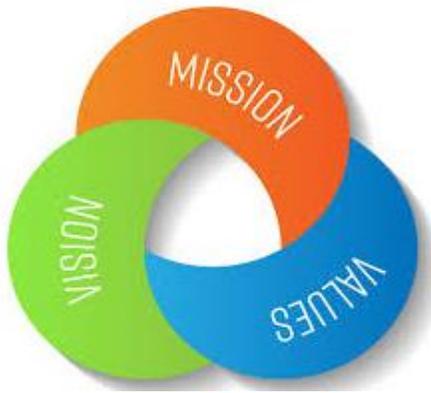
Pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2021, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung tahun 2021, Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung tahun 2021, dan Realisasi Anggaran tahun 2021.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini berisi tinjauan umum dan saran tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2020-2024



BPS Kabupaten Bandung berupaya turut serta berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik guna mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi yang disusun BPS Kabupaten Bandung untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Visi tersebut mengandung makna bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Visi tersebut kemudian dirumuskan menjadi misi BPS yang disusun dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS, serta melaksanakan Misi Presiden

dan Wakil Presiden yang ke-1 (peningkatan Kualitas Indonesia Maju), Ke-2 (Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

MISI 1

Menyediakan statistik berkualitas Yang berstandar nasional maupun internasional

MISI 2

Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

MISI 3

Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

MISI 4

Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah



Makna dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
Menyediakan data statistik bermakna bahwa Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007).
Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, aktual, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan.
Berstandar internasional mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kabupaten Bandung akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*.
2. Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) mengandung makna bahwa BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS Kabupaten Bandung juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran (UU no. 16 tahun 1997).

Hal ini sesuai juga dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik

nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS Kabupaten Bandung dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: (i) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; (ii) Pengembangan statistik sebagai ilmu; (iii) Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; (iv) Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; (v) Pengembangan sistem informasi statistik; (vi) Peningkatan penyebarluasan informasi statistik; (vii) Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; (viii) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: (i) Pelaksanaan kegiatan statistik; (ii) Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik.

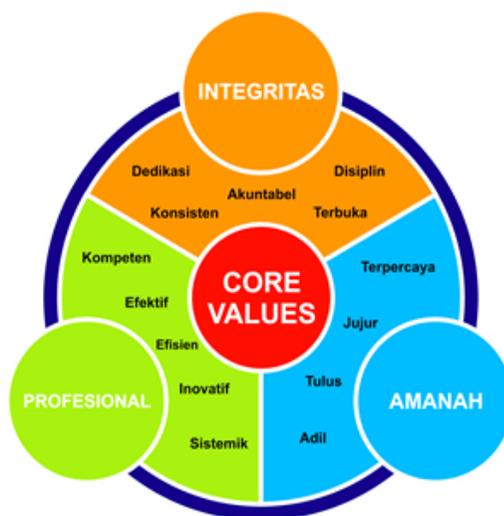
Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan mengandung makna bahwa Sistem Statistik Nasional merupakan suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan.(UU no. 16 tahun 1997).

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik bermakna bahwa kepuasan masyarakat sebagai pengguna data menjadi tujuan utama. Kepuasan terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Dengan pelayanan yang prima, maka diharapkan BPS Kabupaten Bandung dapat ikut serta mewujudkan Sistem Statistik Nasional.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Membangun SDM yang unggul dan adaptif dapat tercermin pada insan statistik yang mampu mewujudkan pengejawantahan nilai nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni **profesional, berintegritas** dan **amanah**.



Profesional mengandung makna bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.

BerIntegritas bermakna bahwa Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur).

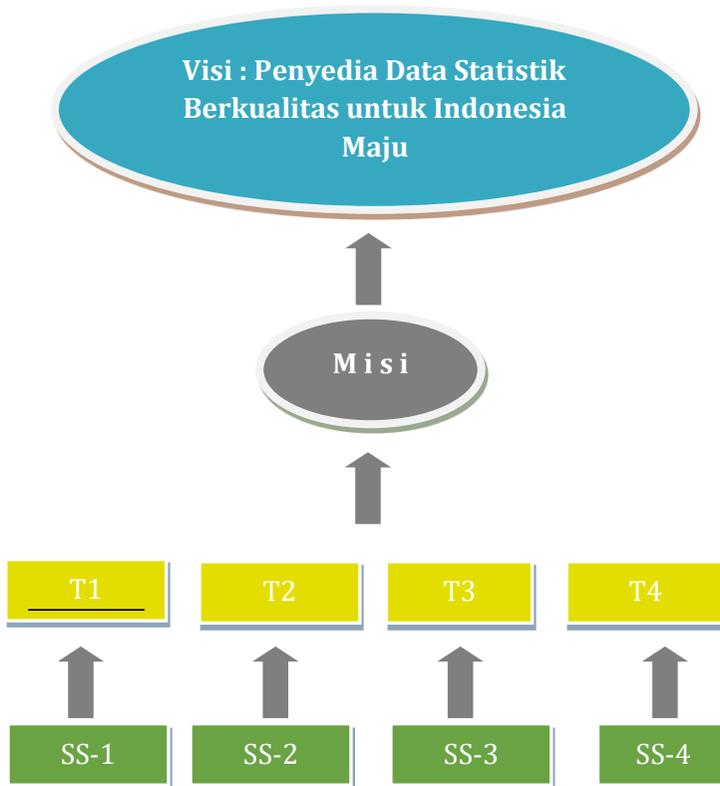
Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik.

Penetapan tujuan kemudian dirumuskan guna mendukung terwujudnya visi dan misi BPS Kabupaten Bandung. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
T1. Penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T2. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Meningkatnya penguatan statistik sektoral Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)
T3. Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Meningkatnya penguatan komitmen Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) terhadap SSN
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. Meningkatnya pembangunan SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas dan amanah

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung 2021

Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen BPS Kabupaten Bandung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja. Penetapan target tahunan dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	92
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	44,12

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	69,5
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	75

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring dan dilaporkan sebagai laporan interim (triwulanan) setiap triwulanan dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Bandung atas penggunaan anggaran BPS Kabupaten Bandung.

Perjanjian Kinerja yang telah disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat Eselon IV (Koordinator Fungsi dan Kepala SubBagian Umum). Peranan masing-masing pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kontribusi unit Eselon IV terhadap Penyusunan Target Indikator

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tata Usaha	Statistik Sosial	Statistik Distribusi	Statistik Produksi	Nerwilis	IPDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk pembangunan							
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional						*
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional		*			*	*
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
2.1.Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik						*

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tata Usaha	Statistik Sosial	Statistik Distribusi	Statistik Produksi	Nerwilis	IPDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar						*
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK		*	*	*	*	*
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	*	*	*	*	*	*
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	*					

Keterangan :

* : Penanggungjawab

* : Kontributor

Keberhasilan pencapaian target kinerja sangat didukung oleh anggaran yang diberikan untuk satker BPS Kabupaten Bandung. Bentuk dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program kegiatan yang berada di BPS Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen (Dukman)
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Tabel 8. Jumlah Anggaran Menurut Program Kegiatan BPS Kabupaten Bandung 2021

No	Program	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)	Rp. 5.238.540.000,-
2.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	Rp. 3.553.269.000,-

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2021 Terhadap Target Perjanjian Kinerja 2021

Capaian kinerja merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2021. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK (Perjanjian Kinerja) tahun 2021 yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah *“Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan”*, yang dicapai melalui sasaran strategis, *“Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas”*.

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan, yaitu:

- a) Meningkatkan akurasi data, melalui :
 - Integrasi proses bisnis; serta
 - Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.

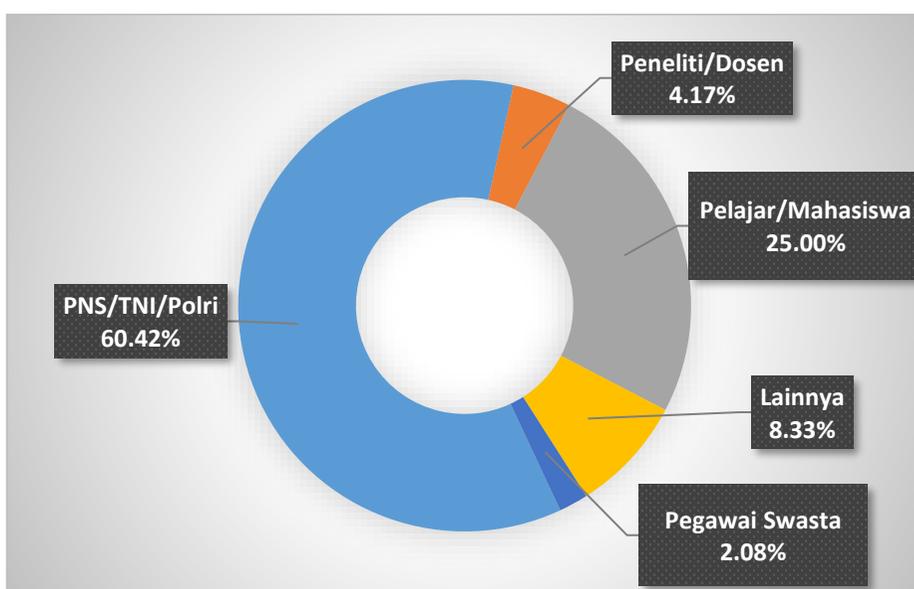
- b) Memastikan kemutakhiran data dengan:
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia

Tabel 9. Capaian Kinerja Tujuan: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas				
Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	92.00	70.59	76.73
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran				88.365

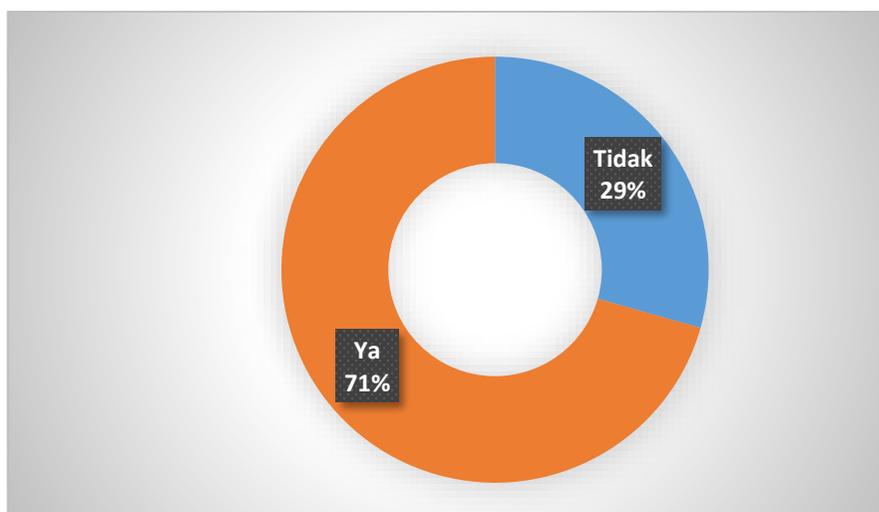
Pada lingkup BPS Kabupaten Bandung, tujuan tersebut telah tercapai dengan rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 88.365 persen. Dengan indikator sasaran strategis *“Persentase Pengguna Data yang Menggunakan Data BPS Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Nasional”* tercatat mencapai 76.73 persen. Sementara indikator sasaran *“Persentase Publikasi Statistik yang Menerapkan Standar Akurasi Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Nasional”* mencapai 100 persen.

Pencapaian tujuan pada indikator *“persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”* diwujudkan dalam bentuk Survei Kepuasan Data Tahun 2021 (SKD 2021), yang dilaksanakan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bandung pada bulan Juni-September 2021. Jumlah responden SKD 2021 sebanyak 48 responden, melebihi target yang telah ditentukan sebanyak 30 responden. Konsumen yang menjadi responden adalah konsumen yang menerima pelayanan pada 1 Januari 2021 sampai dengan periode akhir pencacahan.



Gambar 9. Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2021

Dari keseluruhan responden SKD 2021, sebagian besar konsumen PST BPS Kabupaten Bandung merupakan PNS/TNI/Polri (60,42%). Hal ini menunjukkan bahwa selama 2021 konsumen utama PST BPS Kabupaten Bandung adalah Dinas/Instansi/OPD di Kabupaten Bandung yang menggunakan data BPS sebagai bahan pembuatan kebijakan. Kemudian sebanyak 25 persen konsumen PST BPS Kabupaten Bandung selama 2021 adalah pelajar/mahasiswa yang menggunakan data BPS sebagai bahan untuk penyusunan tugas akhir ataupun tugas mata kuliah tertentu. Sementara itu konsumen yang merupakan peneliti/dosen hanya 4,17 persen, pegawai swasta hanya 2,08 persen dan pekerjaan utama lainnya sebanyak 8,33 persen.



Gambar 10. Persentase Konsumen di PST BPS Kabupaten Bandung yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan

Hasil SKD 2021 BPS Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa 70,59 persen konsumen yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Pencapaian ini masih berada di bawah target PK 2021.

Salah satu hal yang menjadi kendala diantaranya adalah nilai capaian setiap tahunnya sangat bergantung pada jumlah dan persepsi konsumen yang datang langsung ke PST BPS Kabupaten Bandung.

Strategi yang dilakukan diantaranya adalah peningkatan koordinasi dengan K/L/D/I yang berkunjung, melakukan sosialisasi terkait pelayanan BPS ke K/L/D/I dan melakukan koordinasi dan sosialisasi di tingkat pemerintah daerah dengan menggandeng Diskominfo dan Bappeda.

Sementara itu pencapaian tujuan pada indikator *“persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”* diwujudkan dalam bentuk publikasi statistik yang tercapai sebanyak 5 publikasi dari target 5 publikasi. Publikasi tersebut diantaranya adalah PDRB Menurut Lapangan Usaha, PDRB Menurut Pengeluaran, Statistik Daerah, Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Kendala yang sempat dihadapi dalam penyusunan publikasi tersebut adalah beberapa penyusunan masih memerlukan waktu yang cukup lama pada saat proses editing, namun hal ini dapat diselesaikan dengan dilakukannya koreksi secara berjenjang oleh tim penyusun publikasi.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua, yaitu *“Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN”*, dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu *“Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN”*, melalui 2 (dua) indikator, yaitu: (i) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik, dan (ii) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)

Pada lingkup BPS Kabupaten Bandung, rata-rata capaian tujuan kedua tercatat sebesar 100 persen, begitu pula dengan rata-rata masing indikator sarasannya. Hasil ini diperoleh dengan tercapainya target dinas/instansi/lembaga yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik, dan terkumpulnya metadata statistik sektoral yang menjadi target BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2021.

Tabel 10. Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN				
Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100	100	100
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	44.12	44.12	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran				100

Pada indikator pertama, K/L/D/I yang telah mengajukan rekomendasi kegiatan statistik dan melaksanakan rekomendasi statistik secara online melalui web adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung, sementara pada indikator kedua, sedangkan K/L/D/I yang sudah menyampaikan metadata sektoral diantaranya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Diskopumkm, DP2KBP3A, Dinas Lingkungan Hidup, Disperkimtan, Dinas Perindustrian, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Disparbud dan BPMD.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan kinerja kedua diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran K/L/D/I untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral di K/L/D/I maupun dalam menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar ke BPS.

Strategi yang dilakukan kemudian diantaranya adalah melakukan pembinaan secara berjenjang dengan dibantu oleh Diskominfo dan Bappeda untuk melakukan sosialisasi terkait rekomendasi statistik dan metadata sektoral.

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah “meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”, dengan sasaran strategis “penguatan statistik sektoral K/L/D/I”, melalui 1 (satu) indikator, yaitu Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan *stakeholder* terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada *stakeholder* terhadap SISN
- b) Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung untuk indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut tercapai dengan baik, yaitu sebesar 100 persen, seperti yang dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I				
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10	10	100
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				100

Capaian kinerja untuk indikator yang mengukur tujuan ketiga tercapai dengan baik, yaitu sebesar 100 persen, namun masih perlu kerja keras untuk meningkatkan realisasi ke depannya. K/L/D/I yang telah menyelenggarakan statistik sektoral meliputi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung, Dinas Arsip dan Perpustakaan dan Dinas Pertanian.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan kinerja ini adalah masih rendahnya pemahaman pentingnya kegiatan statistik sektoral dilaksanakan sesuai NSPK. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sosialisasi di rapat-rapat dinas bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung

Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”, tujuan ini diukur melalui sasaran strategis “SDM statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”, dengan 2 (dua) indikator, yaitu (i) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan (ii) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - Penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA)
 - Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*)
 - Penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*
 - *Talent pool* untuk suksesi organisasi
- d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional

-
- Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan *Operation Management System* untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi *data scientist* dan *IT professional*)
 - Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Memenuhi kebutuhansarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
-

- Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Merumuskan *grand design smart office*
 - Implementasi *smart office* di BPS

Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan capaian kinerja mempunyai bobot (20).

Tabel 12. Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi				
4.1 SDM Statistik Yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	69.50	69.39	99.84
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	75	90.63	120
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran				109.92

Nilai rata-rata Capaian Kinerja tujuan keempat BPS Kabupaten Bandung mencapai 109.92 persen. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat tercatat sebesar 69.39 yang berarti hampir mencapai target tahun 2021. Sedangkan indikator sasaran persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS tercatat sebesar 90.63 persen, nilai ini melampaui target tahun 2021 dengan pencapaian sebesar 120 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan keempat dapat tercapai dengan baik. Walaupun demikian, seluruh jajaran BPS Kabupaten Bandung harus lebih meningkatkan lagi kualitas seluruh permintaan laporan dan bukti kegiatan termasuk penyusunan Laporan Kinerja yang lebih baik dan berkesinambungan dengan dokumen penilaian kinerja lainnya guna meningkatkan penilaian SAKIP di tahun yang akan datang.

Sementara untuk indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, nilai realisasi diperoleh dari hasil penilaian hasil survei SKD 2021 dengan hasil penilaian yang sudah memenuhi/di atas target tahunan.

Permasalahan yang terjadi selama tahun 2021 untuk indikator ini adalah adanya beberapa BMN Sarana Prasarana dalam kondisi relatif lama/tua dan rusak. Strategi yang dilakukan kemudian diantaranya adalah melakukan optimalisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, usulan pengadaan sarana prasarana dan melakukan persiapan terkait pelaksanaan usulan penghapusan BMN sarana prasarana rusak berat.

Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020–2021

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Indikator Sasaran Kinerja Tujuan Pertama adalah **Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan**, yang diukur dengan sasaran strategis **Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas**, memiliki rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 88.365% pada tahun 2021. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar 21.63%, dari nilai pada tahun 2020 sebesar 110%.

Tabel 13. Capaian Kinerja Tujuan: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2020 (%)	Capaian Kinerja 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan			
1.1. Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas			
Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	120	76.73
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran		110	88.365

Capaian Indikator sasaran pertama, yaitu *Persentase Pengguna Data Yang Menggunakan Data BPS Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Nasional* tahun 2021 sebesar 76.73% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 yang tercatat mencapai lebih dari 120%. Pencapaian ini masih berada di bawah target PK 2021.

Tabel 14. Capaian Indikator Sasaran: Persentase Pengguna Data Yang Menggunakan Data BPS Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Nasional

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	75	91.67	122.22
2021	92	70.59	76.73

Seperti telah diulas di atas, salah satu hal yang menjadi kendala diantaranya adalah capaian nilai indikator ini setiap tahunnya sangat bergantung pada jumlah dan persepsi terkait SKD dari konsumen yang datang langsung ke PST BPS Kabupaten Bandung. Beberapa strategi yang telah diupayakan di antaranya adalah peningkatan koordinasi dengan K/L/D/I yang berkunjung, melakukan sosialisasi terkait pelayanan BPS ke K/L/D/I dan melakukan koordinasi dan sosialisasi di tingkat pemerintah daerah dengan menggandeng Diskominfo dan Bappeda.

Sementara itu pencapaian indikator kedua pada tujuan ini, yaitu *Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional*, berhasil mencapai target baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021 yaitu sebesar 100 persen.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Sasaran Kinerja Tujuan kedua, yaitu **Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN** yang diukur dengan Indikator *Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN* tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan, masih tetap mencapai target sebesar 100% seperti tahun sebelumnya.

Tabel 15. Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN

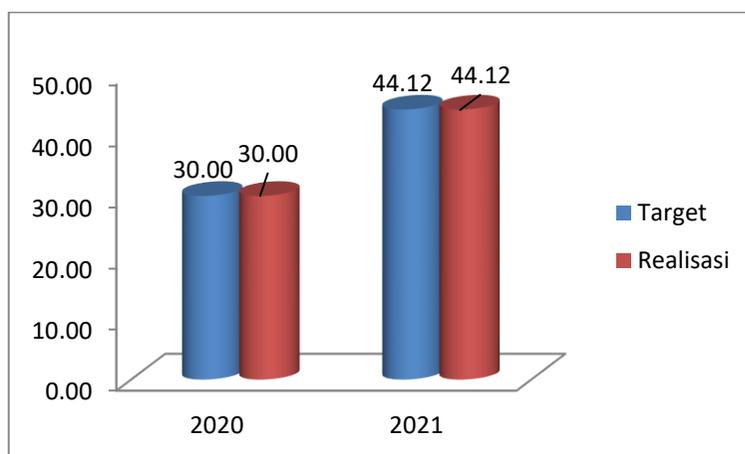
Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2020(%)	Capaian Kinerja 2021(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN			
Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100	100
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran		100	100

Perbandingan antara persentase Target dengan Realisasi pada Tujuan kedua, yaitu **Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN** diukur dengan 2 (dua) Indikator sasaran, yaitu (i) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dan (ii) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.

Indikator sasaran pertama, yaitu, *Persentase K/L/D/I yang Melaksanakan Rekomendasi Kegiatan Statistik*, untuk tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan satuan target. Pada tahun 2020 target yang digunakan adalah persentase dari jumlah OPD yang mengajukan rekomendasi kegiatan statistik dibagi dengan jumlah keseluruhan OPD di Kabupaten Bandung. Sedangkan

pada tahun 2021 target yang digunakan adalah persentase dari jumlah OPD yang mengajukan rekomendasi kegiatan statistik dibagi dengan jumlah OPD yang telah melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik tersebut.

Sedangkan Indikator sasaran kedua, yaitu, *Persentase K/L/D/I yang Menyampaikan Metadata Sektoral dan Khusus Sesuai Standar*, baik pada tahun 2020 maupun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, yaitu masing-masing target sebesar 30% pada tahun 2020 dan 44.12% pada tahun 2021, dengan realisasi masing-masing 30% dan 44.12%, sebagaimana terlihat pada gambar 11.



Gambar 11. Persentase Target - Realisasi Tujuan: Persentase K/L/D/I yang Menyampaikan Metadata Sektoral dan Khusus Sesuai Standar

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Capaian Kinerja Tujuan ketiga, yaitu **Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN** yang diukur dengan Sasaran Strategis *Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I* tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan, masih tetap mencapai target sebesar 100% seperti tahun sebelumnya.

Indikator *Persentase K/L/D/I Yang Mampu Menyelenggarakan Statistik Sektoral secara Mandiri sesuai NSPK*, baik pada tahun 2020 maupun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, yaitu dengan target sebesar 10%, baik pada tahun 2020 maupun 2021, dengan realisasi sesuai target.

Tabel 16. Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2020(%)	Capaian Kinerja 2021(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I			
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran		100	100

Capaian Kinerja Tujuan keempat, yaitu **Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi** yang diukur dengan sasaran strategis *SDM Statistik Yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan*, dengan 2 (dua) indikator, yaitu (i) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan (ii) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Tabel 17. Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Capaian	Capaian
		Kinerja 2020(%)	Kinerja 2021(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi			
4.1 SDM Statistik Yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan			
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	113.2	99.84
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	104.28	120
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran		108.74	109.92

Pada indikator sasaran yang pertama, yaitu *Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat* terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 13.36%, yaitu dari 113.2% pada tahun 2020 menjadi 99.84% pada tahun 2021. Terkait hal ini, seluruh jajaran BPS Kabupaten Bandung diharapkan lebih meningkatkan lagi kualitas seluruh permintaan laporan dan bukti kegiatan termasuk penyusunan Laporan Kinerja yang lebih baik dan berkesinambungan dengan dokumen penilaian kinerja lainnya guna meningkatkan penilaian SAKIP di tahun yang akan datang.

Sementara itu untuk indikator sasaran kedua *Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS* mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 15.72%, dengan capaian baik pada tahun 2020 maupun 2021 sudah di atas 100%. Rata-rata Capaian Indikator Sasaran sedikit mengalami peningkatan sebanyak 1.18%, yaitu dari 108.74 % pada tahun 2020 menjadi 109.92 % pada tahun 2021.

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Terhadap Target Renstra 2021-2024

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung terhadap target Renstra 2020-2024 dihitung berdasarkan realisasi 2021 terhadap target renstra 2021 dan target renstra 2024.

Dalam tujuan pertama, yaitu “*menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan*” dengan sasaran strategis “*meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas*”, terdapat dua indikator yang dapat menggambarkan realisasi pencapaian kinerja di lingkup BPS Kabupaten Bandung.

Dalam hal capaian kinerja indikator sasaran strategis yang pertama yaitu “*persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional*” masih berada dibawah terhadap target renstra 2021 maupun target tahun 2024.

Pencapaian indikator ini terhadap tahun 2021 dihitung sebesar 90,50 persen, sementara terhadap target renstra 2024 baru mencapai 83,04 persen. Hal ini disebabkan nilai capaian yang dihasilkan sangat tergantung pada persepsi pengguna data dalam mengisi Survei Kebutuhan Data setiap tahunnya. Adapun strategi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pelayanan kepada dinas/instansi terkait sebagai pengunjung pelayanan dengan menggandeng Diskominfo dan Bappeda sebagai mitra kerja di level pemerintah daerah kabupaten.

Sementara itu, realisasi pada indikator strategis kedua, yaitu “*persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional*” telah mencapai 100 persen. Target indikator ini dalam renstra 2020-2024 adalah tercatat sebesar 5.4 persen baik pada tahun 2021 dan tahun 2024. Dalam hal ini capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan

terdapat perbedaan konsep ketika membuat target renstra 2020-2024 dengan kondisi saat ini.

Pada target renstra 2021 ditetapkan sebesar 5,4 persen dimana konsepnya pada saat pembuatan target renstra adalah jumlah publikasi yang menyajikan nilai *Relatif Standar Error* (RSE) dibanding keseluruhan total publikasi yang disusun. Sementara target pada perjanjian kinerja 2021 adalah jumlah publikasi yang menggunakan data *Relatif Standar Error* (RSE) dalam penyusunannya sehingga sesuai kesepakatan BPS Provinsi Jawa Barat publikasi yang masuk menjadi PDRB Menurut Lapangan Usaha, PDRB Menurut Pengeluaran, Statistik Daerah, Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Tujuan kedua yaitu "*meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN*" dengan sasaran strategis "*penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN*" diwujudkan oleh dua indikator kinerja sasaran.

Pertama, adalah "*persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik*" dengan realisasi pada 2021 sebesar 100 persen. Capaian kerjanya terhadap target renstra 2021 tidak dapat diperbandingkan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konsep antara target pada renstra 2020-2024 dengan target pada perjanjian kinerja 2021.

Target yang ditetapkan pada renstra 2020-2024 merupakan persentase jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik terhadap total K/L/D/I yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Bandung. Sementara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 merupakan jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik saja sehingga realisasinya tercapai sesuai dengan target pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian, jumlah K/L/D/I yang mengajukan rekomendasi kegiatan statistik belum signifikan. Permasalahannya adalah masih rendahnya kesadaran K/L/D/I untuk melaporkan kegiatan statistik sektoralnya. Strategi ke depannya adalah perlu dilakukan pembinaan statistik sektoral secara berjenjang untuk meningkatkan pemahaman K/L/D/I terkait pentingnya rekomendasi kegiatan statistik dengan menggandeng Diskominfo untuk turut serta mensosialisasikan terkait rekomendasi statistik.

Indikator kinerja sasaran kedua guna mendukung terwujudnya sasaran strategis *“penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN”* yaitu *“persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar”*. Realisasinya pada tahun 2021 sebesar 44,12 persen sesuai dengan target PK yang telah ditetapkan. Keterbandingan baik dengan target renstra 2021 maupun 2024, capaian kinerjanya sudah melebihi 100 persen. Artinya realisasinya sudah melebihi target renstra yang telah ditetapkan.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah K/L/D/I yang ada masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran K/L/D/I dalam menyampaikan metadata sektoral sehingga ke depannya perlu upaya bersama Bappeda dan Diskominfo melakukan pembinaan terkait metadata. Selain itu, sosialisasi melalui forum Satu Data Indonesia (SDI) juga diperlukan terkait pentingnya metadata yang dihimpun dari berbagai K/L/D/I yang ada.

Pencapaian tujuan ketiga yaitu *“meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”* dengan sasaran strategis *“penguatan statistik sektoral K/L/D/I”* diwujudkan oleh satu indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran yang dimaksud adalah *“Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK”*. Capaian kinerjanya terhadap target renstra 2021 sebesar 83,33 persen. Sementara untuk capaian kinerja jangka menengah jika dibandingkan terhadap renstra 2024, baru mencapai 50 persen dari target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi adalah pemahaman K/L/D/I terhadap pentingnya kegiatan

statistik sektoral yang sesuai dengan NSPK masih rendah. Strategi yang dilakukan adalah peningkatan pembinaan statistik sektoral di lingkungan K/L/D/I serta sosialisasi melalui Diskominfo pada forum-forum rapat.

Tujuan terakhir yang dituangkan dalam tujuan keempat yaitu *“Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”* dengan sasaran strategis *“SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”* diwujudkan dalam dua indikator kinerja sasaran. Pertama, hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat dimana realisasinya sebesar 69,39 poin berada diatas target renstra 2021 yang hanya menargetkan sebesar 61,30 poin. Dengan demikian, capaian kinerjanya terhadap target renstra 2021 sebesar 113,30 persen dan capaian kinerja jangka menengahnya sebesar 112,65 persen.

Namun demikian, nilai SAKIP yang dicapai ini masih dibawah target yang ditetapkan dalam PK 2021. Strateginya adalah dengan lebih meningkatkan lagi kualitas seluruh permintaan laporan dan bukti kegiatan termasuk penyusunan Laporan Kinerja yang lebih baik dan berkesinambungan dengan dokumen penilaian kinerja lainnya guna meningkatkan penilaian SAKIP di tahun yang akan datang.

Indikator kinerja sasaran kedua yang mendukung tercapainya tujuan keempat yaitu *“persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS”*. Nilai realisasi dan capaian kinerja 2021 diperoleh dari hasil penilaian survei SKD 2021 dengan hasil penilaian yang sudah memenuhi/diatas target tahunan maupun target renstra 2021. Beberapa permasalahan yang ditemui diantaranya terdapat beberapa Barang Milik Negara (BMN) dengan sarana dan prasarana dalam kondisi relatif lama/tua dan rusak sehingga perlu optimalisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana.

Tabel 18. Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021 (%)	Capaian Kinerja 2024 (%)	Keterangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan								
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	78	85	70,59	90,50	83,04	Capaian kinerjanya terhadap target renstra 2021 sebesar 90,5 persen. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi pengunjung yang datang ke pelayanan sehingga koordinasi dan sosialisasi pelayanan kepada instansi terkait perlu ditingkatkan.
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	5,4	5,4	100	-	-	Tidak dapat dapat diperbandingkan dikarenakan perbedaan konsep

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021 (%)	Capaian Kinerja 2024 (%)	Keterangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN								
2.1.Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	3,1	5	100	-	-	Tidak dapat dibandingkan dikarenakan perbedaan konsep
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	15	30	44,12	294,13	147,07	Capaian kinerjanya terhadap target renstra 2024 sudah melebihi target yakni sebesar 147,07 persen
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN								
3.1.Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	Persen	12	20	10	83,33	50,00	Capaian Kinerjanya terhadap renstra 2024 baru mencapai 50 persen. Pembinaan statistik sektoral di lingkungan K/L/D/I perlu ditingkatkan.

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021 (%)	Capaian Kinerja 2024 (%)	Keterangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi								
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	61,3	61,6	69,39	113,20	112,65	Capaian kinerjanya terhadap target renstra 2024 sudah melebihi target yakni sebesar 112,65 persen
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	75	85	90,62	120,83	106,61	Capaian kinerjanya terhadap target renstra 2024 sudah melebihi target yakni sebesar 106,61 persen.

Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional yang diuraikan ke dalam 24 (dua puluh empat) Program Prioritas.

Kebijakan pemerintah 5 (lima) Prioritas Nasional tersebut adalah :

- 1) **Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan**
- 2) **Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah**
- 3) **Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja**
- 4) **Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup**
- 5) **Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**

Pada tahun 2021 ini, terdapat beberapa kegiatan sensus/survei yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung dan diantaranya terdapat beberapa *output* kegiatan survei pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang masuk ke dalam 3 (tiga) Prioritas Nasional tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Sensus Penduduk 2021, masuk ke dalam **Prioritas Nasional** :
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Kegiatan Survei Pendataan Potensi Desa , masuk ke dalam **Prioritas Nasional** :
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Kegiatan Survei Statistik Tanaman Pangan dan Survei Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area, masuk ke dalam **Prioritas Nasional** :
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

PENDATAAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA (KSA)

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital di dunia. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang kedua yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Di Indonesia, peranan sektor pertanian juga tidak kalah pentingnya karena sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, pemerintah Indonesia juga sedang gencar melancarkan program-program yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian dalam upaya mendukung salah satu Nawacita yakni terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, tersedianya data pertanian yang tepat waktu dan akurat merupakan pondasi untuk dapat mewujudkan kebijakan pertanian yang tepat sasaran.

Selama ini, pengumpulan data luas panen baik padi maupun palawija masih menggunakan metode konvensional dengan menggunakan daftar isian Statistik Pertanian (SP). Berdasarkan metode tersebut, pengumpulan data luas panen masih didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (*eye estimate*). Meskipun secara praktikal, metode tersebut mudah untuk diterapkan, tetapi penggunaan metode tersebut masih memiliki kekurangan. Rendahnya akurasi dan waktu pengumpulan data yang cukup lama menjadi beberapa kekurangan dari penggunaan metode tersebut.

Dukungan untuk perbaikan data pertanian khususnya terkait metodologi pengumpulan data telah datang dari berbagai pihak, diantaranya dari Forum Masyarakat Statistik (FMS) Indonesia dan Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia. Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan untuk hanya menggunakan satu data ke depannya dalam pengambilan kebijakan, yaitu data BPS.

Data BPS menjadi acuan semua instansi di Indonesia. Sesuai dengan instruksi Presiden tersebut, maka satu data pangan bersumber dari BPS. Mengingat satu data pangan yang diperlukan untuk berbagai pengambilan kebijakan, BPS semakin dituntut untuk menyediakan data pangan yang akurat dan tepat waktu. Data pangan yang dihasilkan oleh BPS diharapkan dapat menggambarkan kondisi lapangan yang sesungguhnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPS melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan sistem pelaporan yang berbasis teknologi dalam rangka memperbaiki metodologi pengumpulan data statistik pertanian. Kerjasama tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk “Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)”.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data yang dahulu konvensional menjadi lebih objektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

Pelaksanaan pengumpulan data statistik pertanian dengan menggunakan sistem KSA ini juga merupakan tindak lanjut pengembangan dan perbaikan dari kegiatan uji coba sebelumnya yakni Uji Coba KSA di Pulau Jawa pada tahun 2017. Pelaksanaan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area di Kabupaten Bandung dilaksanakan setiap bulan.

Kabupaten Bandung mendapat 104 segmen sampel pada Januari – Agustus 2018. Pada September 2018 ditambah 14 sampel segmen sehingga totalnya menjadi 118 segmen sampel. Jumlah sampel tersebut masih bertahan sampai sekarang. Rincian daftar sampel KSA komoditas padi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Daftar Sampel Segmen KSA Komoditas Padi BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

KODE	KECAMATAN	JUMLAH SAMPEL
(1)	(2)	(3)
010	CIWIDEY	5
011	RANCABALI	3
020	PASIRJAMBU	4
030	CIMAUNG	6
040	PANGALENGAN	2
050	KERTASARI	2
060	PACET	6
070	IBUN	3
080	PASEH	6
090	CIKANCUNG	5
100	CICALENGKA	3
101	NAGREG	3
110	RANCAEKEK	7
120	MAJALAYA	4
121	SOLOKAN JERUK	5
130	CIPARAY	7
140	BALEENDAH	3
150	ARJASARI	6
160	BANJARAN	3
161	CANGKUANG	3
170	PAMEUNGPEUK	2
180	KATAPANG	3
190	SOREANG	3
191	KUTAWARINGIN	3
250	MARGAASIH	2
260	MARGAHAYU	2
270	DAYEUKHKOLOT	2
280	BOJONGSOANG	5
290	CILEUNYI	4
300	CILENGKRANG	3
310	CIMENYAN	3
Total	KABUPATEN BANDUNG	118

Tabel 20. Daftar Sampel Segmen KSA Komoditas Jagung BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

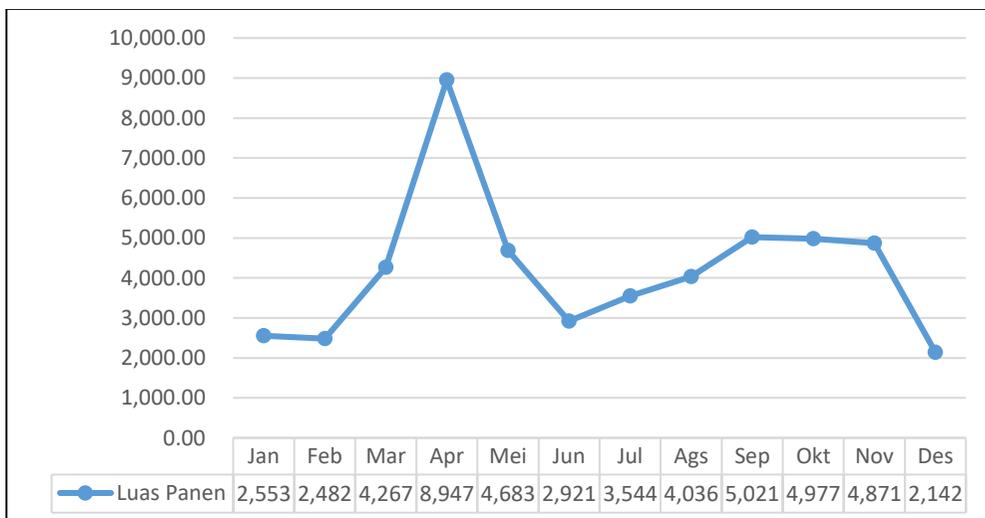
KODE	KECAMATAN	JUMLAH SAMPEL
(1)	(2)	(3)
010	CIWIDEY	2
011	RANCABALI	4
020	PASIRJAMBU	3
030	CIMAUNG	4
040	PANGALENGAN	2
050	KERTASARI	3
060	PACET	5
070	IBUN	3
080	PASEH	5
090	CIKANCUNG	8
100	CICALENGKA	8
101	NAGREG	10
120	MAJALAYA	2
121	SOLOKAN JERUK	2
130	CIPARAY	2
140	BALEENDAH	3
150	ARJASARI	4
160	BANJARAN	2
161	CANGKUANG	2
170	PAMEUNGPEUK	2
180	KATAPANG	2
190	SOREANG	2
191	KUTAWARINGIN	4
250	MARGAASIH	1
260	MARGAHAYU	2
270	DAYEUHKOLOT	2
280	BOJONGSOANG	1
290	CILEUNYI	4
300	CILENGKRANG	3
310	CIMENYAN	11



Gambar 12. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

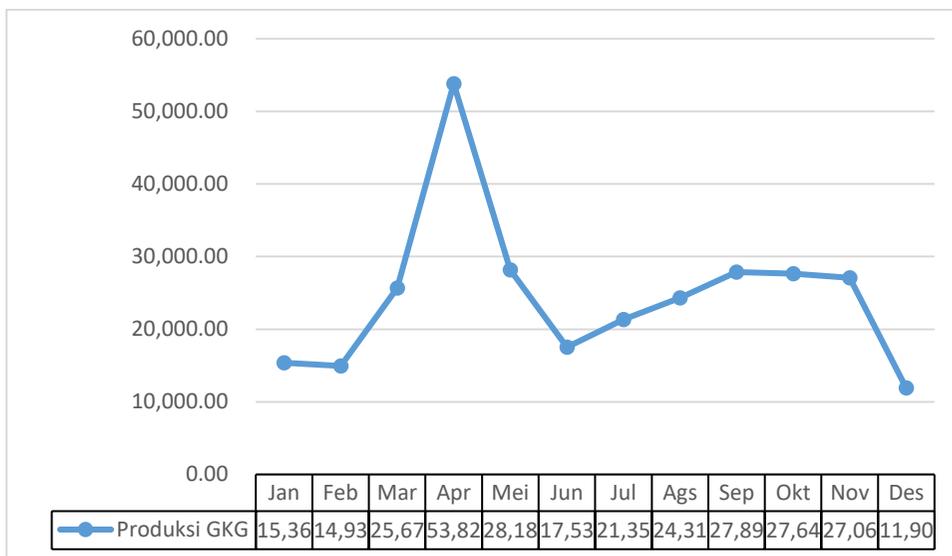
Gambar 12 menunjukkan perkembangan luas panen di Kabupaten Bandung selama bulan Januari hingga Desember 2021. Luas panen padi di Kabupaten Bandung selama periode Januari hingga Desember berada pada interval 2.142 hektar sampai 8.947 hektar dengan puncak luas panen terjadi pada bulan April.

Gambar 11. Perkembangan Luas Panen Padi KSA Kabupaten Bandung Tahun 2021 (Hektar)



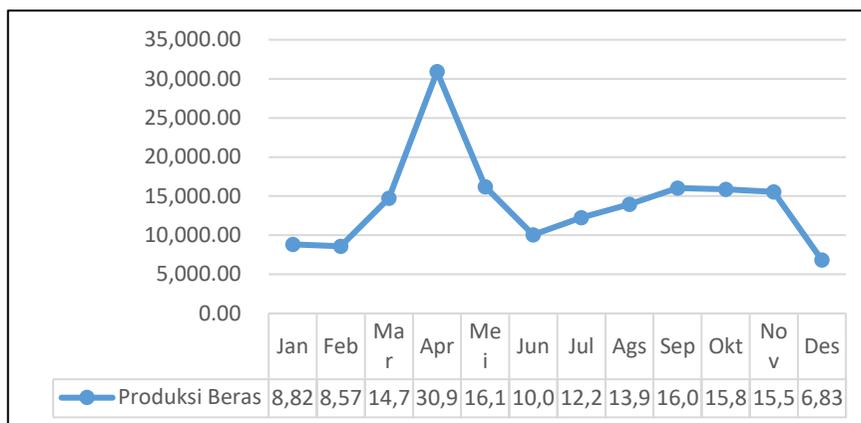
Gambar 1 menunjukkan secara kumulatif, luas panen padi di Kabupaten Bandung selama periode Januari hingga Desember 2021 sekitar 50.451,87 hektar. Perkembangan yang dimiliki selama periode tersebut cenderung mengalami peningkatan dengan puncak panen terjadi pada bulan April.

Gambar 12. Perkembangan Produksi Padi (GKG) di Kabupaten Bandung Tahun 2021 (Ton)



Gambar 14 menunjukkan secara kumulatif, produksi padi di Kabupaten Bandung selama periode Januari hingga Desember sebanyak 295.689,22 ton. Perkembangan yang dimiliki selama periode tersebut secara umum cenderung mengalami peningkatan dimana produksi padi pada bulan Januari sebanyak 15.360,42 ton hingga pada bulan November menjadi 27.064,82 ton. Namun, terjadi penurunan pada bulan Desember menjadi 11.904,89 ton. Puncak produksi padi pada periode ini terjadi pada bulan April dengan produksi sebanyak 53.822,12 ton.

Gambar 13. Perkembangan Produksi Beras di Kabupaten Bandung Tahun 2021 (Ton)



Gambar 15 menunjukkan perkembangan produksi beras di Kabupaten Bandung dalam periode Januari hingga Desember 2021. Secara umum, perkembangan yang dimiliki cenderung mengalami peningkatan dari awal hingga akhir periode. Produksi beras pada Januari sebesar 8.824,67 ton terus mengalami peningkatan hingga pada November menjadi 15.548,94 ton. Namun, pada bulan Desember produksi beras mengalami penurunan menjadi 6.839 ton. Secara kumulatif, total produksi beras di Kabupaten Bandung tahun 2021 mencapai 169.874,61 ton dengan puncak produksi terjadi pada bulan April sebesar 30.921,20 ton.

Pelaksanaan kegiatan Survei Tanaman Pangan yang Terintegrasi dengan KSA tahun 2021 di Kabupaten Bandung berjalan dengan baik. Seluruh kegiatan dapat mencapai realisasi sebesar 100 persen untuk seluruh target yang ditetapkan. Kendala yang terjadi selama kegiatan berkaitan dengan perangkat yang dimiliki oleh petugas untuk melaksanakan KSA. Spesifikasi perangkat yang dimiliki petugas tidak semuanya memenuhi spesifikasi minimal yang dapat digunakan untuk memasang aplikasi Survei KSA. Selain itu, kendala jaringan yang belum merata dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Bandung dapat menghambat kelancaran petugas dalam melaksanakan KSA. Adapun kendala geografis lebih kearah medan dan cuaca lapangan dimana perjalanan menuju lokasi yang jika hujan tidak memungkinkan atau lokasi sampel yang kondisinya sedang banjir.

PENDATAAN PRA LONG FORM SP2020

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) diamanatkan untuk melaksanakan sensus penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Dalam perjalanannya, sensus penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk yang ketujuh. Selain amanat undang-undang, penyelenggaraan sensus penduduk juga direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam *“Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses”* (UN, 2008).

Kekuatan data sensus penduduk terletak pada kemampuannya menyediakan statistik dasar secara komprehensif dengan beragam kompleksitas perubahannya sampai wilayah administratif terkecil. Data sensus penduduk juga bermanfaat sebagai dasar menghitung parameter-parameter kependudukan, pembentukan kerangka sampel, dan penyusunan proyeksi penduduk. Selanjutnya, data SP2020 juga sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sensus Penduduk 2020 merupakan upaya Indonesia untuk menuju satu data kependudukan.

Rangkaian kegiatan SP2020 dilaksanakan ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan *short form* dan instrumen lainnya pada tahun 2020 kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan *long form* pada tahun 2021. Namun adanya *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19 kegiatan LF SP2020 pada tahun 2021 dihentikan pada tanggal 8 Juli 2021.

Kemudian pada tanggal 30 September 2021 melalui surat Kepala BPS Provinsi Jawa Barat nomor B-279/32520/SS.300/09/2021 diberitahukan terkait kegiatan pra pemutakhiran *long form* Sensus Penduduk 2020. Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020 dilaksanakan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan LF SP2020 pada tahun 2022. Kegiatan lapangan semula direncanakan pada tanggal 17 – 31 Oktober, kemudian diperpanjang menjadi 17 Oktober – 10 November 2021.

Latar belakang dilaksanakannya pra pemutakhiran LF SP2020 adalah :

1. Diperlukan *update prelist* untuk LF SP2020, *prelist* yang tersedia saat ini berdasarkan SP2020 (kondisi sudah hampir setahun)
2. Perencanaan untuk moda CAWI dan CATI LF SP2020
3. Perbaikan kasus-kasus lapangan (Blok Sensus dengan kriteria tertentu), adanya variasi dalam pembentukan blok sensus dari SLS, disinyalir banyak masalah yang ditimbulkannya. Kegiatan pra pemutakhiran ini sebagai upaya melakukan perbaikan kasus lapangan

Kegiatan pra pemutakhiran LF SP2020 di Kabupaten Bandung diawali dengan identifikasi blok sensus, rekrutmen petugas, briefing instruktur, briefing petugas, pengalokasian wilayah tugas, pelaksanaan lapangan, monitoring dan evaluasi. Dalam setiap tahapan, tidak lepas dari adanya kendala dan permasalahan. Penyelesaian kendala dan masalah pun dilakukan dengan berbagai upaya.

Maksud dan Tujuan

1. Persiapan LF SP2020 TA 2022
 - a. Memperkuat kerangka sampel untuk pendataan LF SP2020 TA 2022
 - b. Dasar perencanaan anggaran untuk moda CATI dan CAWI
2. Masukan untuk perencanaan Sensus Pertanian dan Survei Lain
3. Terutama untuk wilayah yang sudah tersedia *prelist*
4. Sarana pemanfaatan kegiatan persiapan LF SP2020
5. Seperti pelatihan Innas, pembuatan materi/video pembelajaran
6. Bahan masukan kajian pemanfaatan *enumeration area* SLS

**Tabel 21. Penyesuaian Jumlah Blok Sensus dan Kebutuhan Petugas Pra Pemutakhiran
Long Form SP2020**

Kecamatan	Jumlah Blok Sensus dan Kebutuhan Petugas (Revisi)				
	Blok Sensus	Petugas	Pemeriksa	Koseka	Total Petugas
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
CIWIDEY	12	4	1	1	6
RANCABALI	6	2	1		3
PASIRJAMBU	15	5	1		6
CIMAUNG	9	3	1		4
PANGALENGAN	24	8	2	1	11
KERTASARI	9	3	1		4
PACET	15	5	1		6
IBUN	12	4	1		5
PASEH	18	6	1		7
CIKANCUNG	9	3	1		4
CICALENGKA	15	5	1	1	7
NAGREG	9	3	1		4
RANCAEKEK	27	9	2	1	12
MAJALAYA	18	7	1	1	9
SOLOKAN JERUK	9	3	1		4
CIPARAY	18	6	1		7
BALEENDAH	33	10	3	1	14
ARJASARI	15	5	1	1	7
BANJARAN	21	7	1		8
CANGKUANG	9	3	1		4
PAMEUNGPEUK	9	3	1		4
KATAPANG	18	6	1	1	8
SOREANG	12	4	1		5
KUTAWARINGIN	18	7	2		9
MARGAASIH	18	6	1		7
MARGAHAYU	19	6	1	1	8
DAYEUKHKOLOT	84	20	4	1	25
BOJONGSOANG	24	8	2		10
CILEUNYI	27	9	2	1	12

Kecamatan	Jumlah Blok Sensus dan Kebutuhan Petugas (Revisi)				
	Blok Sensus	Petugas	Pemeriksa	Koseka	Total Petugas
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
CILENGKRANG	6	2	1		3
CIMENYAN	12	4	1		5
Kabupaten Bandung	550	176	41	11	228

Rekrutmen Petugas

Rekrutmen petugas dilakukan di BPS kabupaten/kota. Periode pelaksanaan rekrutmen petugas adalah tanggal 1 – 7 Oktober 2021. Sebagian besar petugas yang direkrut adalah calon petugas *Long Form* SP2020 yang pernah diseleksi sebelumnya. Rekrutmen petugas yang dilaksanakan BPS kabupaten/kota mengacu pada Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas yang disampaikan BPS pusat.

Kendala dalam Proses Rekrutmen

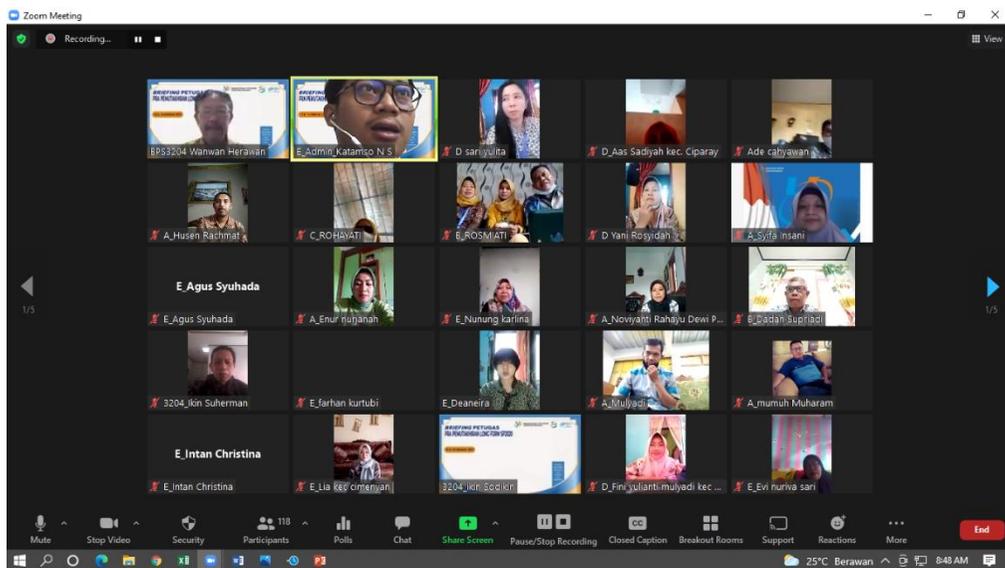
1. Kegiatan dengan jadwal mendadak menyebabkan penanggung jawab kecamatan agak terburu-buru dalam memilih calon petugas
2. Perubahan jumlah BS yang menyebabkan terjadinya pengurangan petugas
3. Jumlah sampel yang tidak ada kejelasan dan ketersediaan anggaran yang minim
4. Mitra yang baru susah mendaftar ke *mitra.bps.go.id*
5. Adanya persyaratan tes antigen
6. Sulit mencari petugas yang memiliki Gadget standar minimal, jumlah petugas berubah-ubah, sulit mencari petugas sesuai wilayah tugas
7. Waktu yang sangat terbatas dan surat yang serba mendadak, sehingga menyebabkan panitia tidak dapat melakukan proses seleksi petugas. Solusinya mengambil petugas dari hasil rekrutmen LF SP 2020 yang lalu.

Briefing Petugas Lapangan

Materi yang disampaikan pada briefing Innas, briefing instruktur pra pemutakhiran, dan briefing petugas disesuaikan menurut zona CAPI. Briefing petugas pra pemutakhiran

dilaksanakan 2 gelombang yaitu gelombang 1 pada tanggal 15 dan gelombang 2 pada tanggal 16 Oktober 2021. Tiap gelombang terdapat 5 kelas, dengan instruktur sebanyak 5 orang.

Gambar 16. Dokumentasi *Briefing* Petugas Pra Pemutakhiran Long Form SP2020



Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan lapangan pra pemutakhiran long form SP2020, BPS Kabupaten Bandung menggunakan :

1. Monpra-pp, yaitu aplikasi yang dibangun BPS Provinsi Jawa Barat untuk monitoring progress lapangan
2. *Dashboard* monitoring dari BPS yang tersedia di akhir Oktober 2021.

Tabel 22. Target dan Realisasi Progres Lapangan LF SP2020

Kecamatan	Target BS	BS Selesai	% BS Selesai	BS Sedang	% BS Sedang	BS (Sudah+ Sedang)	% BS (Sudah+ Sedang)
CIWIDEY	12	12	100	0	0	12	100
RANCABALI	6	6	100	0	0	6	100
PASIRJAMBU	15	15	100	0	0	15	100
CIMAUNG	9	9	100	0	0	9	100
PANGALENGAN	24	24	100	0	0	24	100
KERTASARI	9	9	100	0	0	9	100
PACET	15	15	100	0	0	15	100
IBUN	12	12	100	0	0	12	100
PASEH	18	18	100	0	0	18	100
CIKANCUNG	9	9	100	0	0	9	100
CICALENGKA	15	15	100	0	0	15	100
NAGREG	9	9	100	0	0	9	100
RANCAEKEK	27	27	100	0	0	27	100
MAJALAYA	18	18	100	0	0	18	100
SOLOKAN JERUK	9	9	100	0	0	9	100
CIPARAY	18	18	100	0	0	18	100
BALEENDAH	33	33	100	0	0	33	100
ARJASARI	15	15	100	0	0	15	100
BANJARAN	21	21	100	0	0	21	100
CANGKUANG	9	9	100	0	0	9	100
PAMEUNGPEUK	9	9	100	0	0	9	100
KATAPANG	18	18	100	0	0	18	100
SOREANG	12	12	100	0	0	12	100
KUTAWARINGIN	18	18	100	0	0	18	100
MARGAASIH	18	18	100	0	0	18	100
MARGAHAYU	19	19	100	0	0	19	100
DAYEUHKOLOT	84	84	100	0	0	84	100
BOJONGSOANG	24	24	100	0	0	24	100
CILEUNYI	27	27	100	0	0	27	100
CILENGKRANG	6	6	100	0	0	6	100
CIMENYAN	12	12	100	0	0	12	100
Kabupaten Bandung	550	550	100	0	0	550	100

Permasalahan dan Solusi

Kendala ICS dari Persiapan hingga Pelaksanaan Lapangan

1. Proses *submit, reject & approve* terkendala gangguan ICS
2. Pada aplikasi tidak bisa menambahkan keluarga (tombol + menghilang)
3. ICS *loading* terus
4. Data petugas yang sedang kondisi pending kembali ke Open
5. Sulit melakukan submit
6. Kortim setelah sinkronisasi data tetap 0.
7. Data tidak bisa dibuka setelah sinkronisasi
8. Lapangan sudah selesai menggunakan mitigasi PAPI, tetapi terkendala dengan ICS
9. Proses maintenance server tanpa pemberitahuan sebelumnya membuat data di ICS jadi kosong dan menimbulkan keresahan di petugas (takut data hilang)
10. Tidak mau memberikan no hp dan alamat email karena faktor *privacy* di ICS error
11. Harus bolak balik ke lapangan karena tagging tidak berhasil
12. *Synchronize* di kortim tidak sempurna, data masuk sebagian, data yang masuk jika dibuka, isinya kosong dari jumlah art hingga rincian akhir
13. Data ruta di ICS ppl sudah sukses tersubmit, di ICS kortim status masih open meski sudah melakukan *synchronize*
14. Data Ruta di ICS ppl sudah tersubmit, di cek jejak datanya tidak ditemukan, di ICS kortim juga tidak ditemukan.
15. Petugas sudah selesai ketika sampai di PML banyak data yang kosong dan ketika di reject oleh PML datanya malah jadi kosong, solusi dilakukan dengan *revert to submit* melalui akun admin tapi lumayan lama prosesnya
16. Banyak kejadian data pada 0 ketika maintenance tanpa pemberitahuan dan petugas pun harus menunggu tanpa kepastian kapan bisa lagi
17. Kendala ICS, semua yang disubmit statusnya pending
18. Banyak gagal submit, begitupun yang direject tidak dapat disubmit lagi
19. Sudah submit tapi di PML tidak ada ruta tersebut.
20. Lamanya proses keberhasilan submit, menghambat pelaksanaan di BS selanjutnya

-
21. Terdapat kasus data hasil submitted oleh petugas pra pemutakhiran, tidak muncul di CAPI pemeriksa.
 22. Data hasil submitted petugas, ketika dibuka menjadi *blank*.
 23. Data rejected, submitted, tidak muncul baik di petugas pra pemutakhiran maupun pemeriksa.
 24. Data submitted petugas, di CAPI petugas muncul, namun di CAPI atau coolsis dengan akun pemeriksa maupun admin tidak muncul.
 25. Data sudah berhasil di submitted, tetapi tidak muncul, akhirnya sama petugas dilakukan pengisian ulang dengan menambahkan rumah tangga baru. Namun kemudian, data tersebut muncul kembali sehingga data rumah tangga tersebut menjadi double.
 26. Ditemukan pada beberapa Blok Sensus, ada rumah tangga dengan status open, dan belum terassignment ke petugas siapapun.
 27. Ditemukan pada salah satu petugas, jumlah rumah tangga dengan status open sampai dengan ribuan (pada coolsis dengan akun petugas), namun riil nya di lapangan hanya tersisa 50 rumah tangga status open (satu petugas tidak lebih dari seribu rumah tangga)

Kendala Pre-List/Muatan dalam Pelaksanaan Lapangan

1. Peta tidak sesuai dengan muatan prelist, sehingga harus listing.
2. Muatan di prelist tidak sesuai dengan peta, di lapangan banyak melakukan penambahan keluarga
3. Muatan di prelist tidak sesuai dengan peta, di lapangan petugas fokus pada perbaikan isian
4. Muatan BS yang banyak, terlihat dari peta nya, berdampak psikologis tersendiri bagi petugas

Kendala Lainnya di Lapangan

1. Kondisi cuaca setiap hari hujan
2. Sulit mengakses lokasi BS dalam kondisi hujan atau pasca hujan
3. Kondisi jaringan internet buruk terkendala cuaca hujan
4. Petugas menyerah tidak melanjutkan tugas (mengundurkan diri)
5. Honor kecil tidak seperti yang diharapkan
6. Tidak disediakan pulsa untuk petugas di lapangan

-
7. Beberapa petugas yang memang bukan pengangguran murni sehingga baru siang dan sore bisa ke lapangan
 8. Petugas jatuh sakit karena kelelahan
 9. Beberapa BS adalah perumahan yang sulit diakses karena kecurigaan pada tamu/petugas.
 10. Di beberapa wilayah penduduk bisa ditemui sore-mlm hari, petugas harus kerja ekstra di tengah kondisi hujan
 11. Beberapa sulit menemui ketua SLS untuk berkoordinasi
 12. Ada beberapa wilayah yang mengalami resistensi dari warga (petugas harus selalu ditemani Ketua RT, jika tidak ditemani RT warga banyak menolak, sedangkan waktu luang RT terbatas)
 13. Rumah tangga menolak didata
 14. BS di daerah industri yang banyak kost-kostan pekerja, sulit untuk menemui penghuni
 15. Muatan perumahan cukup banyak
 16. Tidak mau memberikan nomor hp dan email dengan alasan mengganggu *privacy*

Solusi

1. Penanganan masalah dilakukan secara berjenjang, dari mulai petugas, pemeriksa, koseka, penanggung jawab di kabupaten/kota, provinsi dan jika tidak bisa tertangani dikonsultasikan ke BPS pusat.
2. Penanganan masalah sebagian besar terkait metodologi dan penanganan CAPI, dilakukan berdasarkan pengalaman serupa pada kegiatan survei lainnya. Namun jika tidak tertangani segera dikonsultasikan ke intama BPS.
3. Penanganan masalah terkait petugas mengundurkan diri, atau kendala cuaca hingga progres di lapangan relatif lama, BPS kabupaten/kota menurunkan tim buser ke lapangan.
4. Kendala gagal *submitted*, *rejected*, *pending*, data hilang dan lain sebagainya terkait CAPI/ICS, penanganan masalah dilakukan melalui Coolsis dengan akun organik (pemeriksa organik atau koseka), sesuai dengan arahan dari intama BPS.

-
5. Penanganan masalah terkait sering terkendalanya server dan CAPI petugas, sebagian petugas melakukan mitigasi dengan menyalin daftar keluarga yang menjadi wilayah tugasnya, atau beberapa kabupaten/kota melakukan pencetakan dokumen menggunakan anggaran mitigasi Covid-19, sehingga pendataan dilakukan secara PAPI. Hal ini berdampak pada terlambatnya proses approve melalui CAPI.
 6. Penanganan masalah dobel, sesuai arahan intama BPS dibiarkan dulu, karena data yang sudah approve tidak bisa dihapus. Hal ini menjadi catatan dalam proses *cleansing data* ke depan terkait kemungkinan ditemukannya data dobel.

SURVEI EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL (SEPBS) 2021

I. Pendahuluan

Pada tahun 2024, target kemiskinan ekstrem di Indonesia ditetapkan menjadi 0 (Nol) persen sesuai arahan yang dinyatakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. *World Bank* dan PBB menetapkan Garis Kemiskinan ekstrem (GKE) sebesar \$1,9 dengan pendekatan PPP per orang per hari. Garis kemiskinan menurut BPS sendiri bila dikonversi menjadi pendekatan PPP adalah sebesar \$2,51 per orang per hari, artinya garis kemiskinan BPS lebih tinggi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, dengan menggunakan definisi *World Bank* dan PBB diperoleh jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem adalah sebanyak 10,86 juta jiwa atau sebesar 4,1 persen dari populasi. Apabila tetap mengandalkan pola *Business As Usual* (BAU), pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 akan sangat berat dilakukan. Berdasarkan analisis yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan pola BAU kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 hanya mampu diturunkan ke level 2,6 sampai dengan 3 persen.

Kementerian/lembaga terkait perlu memastikan akselerasi program pengurangan beban pengeluaran serta peningkatan produktivitas dan pemberdayaan yang berfokus pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Pada pilar Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, BPS berperan pada pilar ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi yang berfokus untuk menetapkan indikator/rujukan capaian penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, dibangunlah Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial (SEPBS) Desember 2021 yang bertujuan untuk mendata efektivitas program tambahan berupa *cash transfer* pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai Desa/ Dana Desa (BLT)Desa/BLT-DD) di 35 kabupaten prioritas kemiskinan ekstrem. Selain itu, BPS berperan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau penurunan kemiskinan ekstrem yang telah ditargetkan.

Sesuai arahan Presiden pada 21 Juli 2021 : Implementasi Tahap 1 penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 difokuskan pada 7 provinsi, dari tiap-tiap provinsi kemudian dipilih 5 kabupaten/kota yang merupakan wilayah kantong kemiskinan. Penetapan 5 kabupaten/kota didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem yang dihasilkan dari kombinasi persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten dengan bobot *equal*.

II. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dimulai dari perekrutan petugas, lalu petugas mengikuti pelatihan supaya pada pelaksanaan lapangan bisa sesuai SOP. Petugas pun perlu dilengkapi dengan berbagai instrumen dan kelengkapan.

2.1 Rekrutmen Petugas

Rekrutmen petugas dilakukan di BPS kabupaten/kota. Periode pelaksanaan rekrutmen petugas adalah Desember 2021. Sebagian besar petugas yang direkrut adalah mitra statistik yang sering ikut dikegiatan BPS Kabupaten Bandung. Rekrutmen petugas yang dilaksanakan BPS kabupaten/kota mengacu pada Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas yang disampaikan BPS pusat.

Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas

Secara umum, proses rekrutmen petugas Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial (SEPBS) Desember 2021 mengacu ke proses rekrutmen petugas pendataan *long form* SP2020 di Buku Pedoman ka BPS SEPBS Desember 2021, dengan beberapa penyesuaian.

Kendala dalam Proses Rekrutmen

1. Kegiatan dengan jadwal mendadak menyebabkan penanggung jawab kecamatan agak terburu-buru dalam memilih calon petugas.
2. Adanya persyaratan tes antigen

-
3. Waktu yang sangat terbatas dan surat yang serba mendadak, sehingga menyebabkan panitia tidak dapat melakukan proses seleksi petugas

2.2 Pelatihan Petugas

Salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan SEPBS adalah pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas terhadap pemahaman konsep dan definisi operasional dari variabel variabel yang ditanyakan dalam survei.

A. Pelatihan Innas

Pelatihan Innas SEPBS diselenggarakan oleh BPS RI selama 2 (dua) hari efektif pada tanggal 9 – 10 Desember 2021 di Politeknik Statistika (STIS) jalan raya Otista 64c Jakarta.

B. Pelatihan Petugas

Tujuan Pelatihan petugas adalah untuk menyiapkan petugas Pengawas Lapangan (PML) dan Pencacah/Pendata Lapangan (PCL) yang menguasai seluruh konsep dan definisi Survei Rumah Tangga Desember 2021/Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial 2021 (SEPBS) sehingga nantinya dapat mengaplikasikan hasil pelatihan pada saat kegiatan lapangan. Peserta pelatihan sebanyak 176 peserta yang terdiri dari 117 pencacah dan 59 pengawas, selain itu Instruktur Nasional (Innas) sebanyak 8 orang dan panitia 16 orang.

Pelaksanaan Pelatihan Petugas Survei Rumah Tangga Desember 2021/ Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial 2021 (SEPBS) diselenggarakan dalam 2 hari efektif yang dimulai pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sampai dengan Senin, 13 Desember 2021 di Hotel Sari Ater Kamboti Bandung, Jalan Lemahneundeut No 7 Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat 40164. Registrasi peserta pelatihan dimulai pada hari minggu pagi dan *check out* pada hari Senin setelah sarapan pagi.

III. Tahap Lapangan

Data yang dihasilkan bersumber dari lapangan, yang didapat petugas lapangan dari sumber data (responden) kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk yang sudah terprogram sebelumnya.

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Lapangan

Pelaksanaan kegiatan lapangan dilaksanakan serentak di Kabupaten Bandung mulai tanggal 15 Desember 2021 dengan menerjunkan 117 petugas pencacah didampingi 59 petugas pemeriksa/pengawas dan disupervisi oleh 15 staf agar diperoleh data yang berkualitas. Target Blok Sensus Survei Efektivitas Program Perlindungan Sosial/Survei Rumah Tangga Desember 2021 Kabupaten Bandung sebanyak 117 BS atau 1170 rumah tangga sampel. Sampel rumah tangga merupakan rumah tangga panel yang diambil dari rumah tangga sampel Susenas Maret 2021.

Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Survei Efektivitas Bantuan Sosial (SEPBS) 2021





3.2 Jumlah Petugas

Jumlah petugas Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial/Survei Rumah Tangga Desember 2021 BPS Kabupaten Bandung sebanyak 176 petugas terdiri dari 59 pemeriksa dan 117 petugas pencacah.

Tabel 23. Jumlah Petugas Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial/ Survei Rumah Tangga Desember 2021 BPS Kabupaten Bandung

NO.	Kecamatan		PCL	PML Organik	PML Mitra	Keterangan
1	010	CIWIDEY	2	1	0	
2	011	RANCABALI	2	0	1	
3	020	PASIRJAMBU	4	0	2	
4	030	CIMAUNG	5	0	2	
5	040	PANGALENGAN	7	1	3	1 PML mengawas juga di Cimaung
6	050	KERTASARI	4	1	1	
7	060	PACET	5	0	3	1 PML mengawas juga di Ciparay
8	070	IBUN	2	0	1	
9	080	PASEH	4	0	2	
10	130	CIPARAY	5	1	1	
11	121	SOLOKAN JERUK	3	0	1	
12	090	CIKANCUNG	3	0	1	
13	100	CICALENGKA	3	1	1	
14	101	NAGREG	1	0	1	
15	110	RANCAEKEK	6	1	2	
16	120	MAJALAYA	4	1	1	
17	140	BALEENDAH	7	1	3	1 PML mengawas juga di Solokanjeruk
18	150	ARJASARI	4	1	1	
19	170	PAMEUNGPEUK	2	1	0	
20	161	CANGKUANG	3		1	
21	160	BANJARAN	3	1	1	1 Pengawas mengawas juga di Cangkung
22	180	KATAPANG	4		2	
23	190	SOREANG	3		1	
24	191	KUTAWARINGIN	5	1	2	1 PML mengawas juga di Soreang

NO.	Kecamatan		PCL	PML Organik	PML Mitra	Keterangan
25	250	MARGAASIH	4	1	1	
26	260	MARGAHAYU	3	0	1	
27	270	DAYEUKHOKLOT	5	1	2	1 PML mengawas juga di Margahayu
28	280	BOJONGSOANG	4	0	2	
29	290	CILEUNYI	5	1	2	1 PML mengawas di Cilengkrang
30	300	CILENGKRANG	1	0	0	
31	310	CIMENYAN	4	0	2	
			117	15	44	176

3.3 Rata-rata Penyelesaian 1 BS

Setiap blok sensus muatannya sama yaitu 10 rumah tangga, dari 117 blok sensus sampel terdapat 1170 rumah tangga sampel, dari 1170 terdapat 67 rumah tangga non respon dikarenakan responden menolak, rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada.

3.4 Kendala Lapangan

Beberapa kendala yang dihadapi di lapangan diantaranya adalah (i) kondisi cuaca setiap hari hujan; (ii) sulit mengakses lokasi BS dalam kondisi hujan atau pasca hujan; (iii) petugas menyerah tidak melanjutkan tugas (mengundurkan diri); (iv) beberapa petugas yang memang bukan pengangguran murni sehingga baru siang dan sore bisa ke lapangan; (v) beberapa BS adalah perumahan yang sulit diakses karena kecurigaan pada tamu/petugas; (vi) Di beberapa wilayah penduduk bisa ditemui sore-malam hari, petugas harus kerja ekstra di tengah kondisi hujan; (viii) beberapa sulit menemui ketua SLS untuk berkoordinasi; (ix) ada beberapa wilayah yang mengalami resistensi dari warga (petugas harus selalu ditemani Ketua RT, jika tidak ditemani RT warga banyak menolak, sedangkan waktu luang RT terbatas); (x) rumah tangga menolak didata

Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung selama tahun 2021 diantaranya adalah penghematan sumber daya dan penganggaran. BPS Kabupaten Bandung telah berupaya untuk melakukan penghematan sumberdaya energi listrik, dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar senantiasa melakukan pengecekan sebelum pulang kerja di masing-masing ruangan kerja, dengan cara mematikan AC (*Air Conditioner*), Monitor PC (*Personal Computer*), CPU (*Computer Processing Unit*), UPS (*Uninterrupted Power Supply*) komputer, Televisi dan lampu ruangan. Upaya himbauan kepada seluruh pegawai di atas, telah berhasil menekan penggunaan listrik dan menghemat biaya pemakaian listrik tahun ini senilai Rp. 5.481.502,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 24).

Tabel 24. Perbandingan Nilai Biaya Penggunaan/Langgan Listrik BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021

Uraian	2020	2021	Selisih 2020 -2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Biaya Penggunaan/ Langganan Listrik (Rp.)	26.944.511,-	21.463.009,-	-5.481.502,-

Penghematan biaya penggunaan telpon kantor, dilaksanakan dengan pemberitahuan dan himbauan kepada seluruh pegawai agar penggunaan telpon kantor hanya digunakan khusus untuk kepentingan dinas saja bukan keperluan pribadi. Hal ini tampaknya relatif berhasil dengan melihat adanya penurunan total pembayaran biaya langganan telpon dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 25. Perbandingan Nilai Biaya Langganan Telpon per Tahun
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Biaya Langganan Telpon per Tahun (Rp.)	2.528.426,-	1.676.878,-	1.414.511,-	1.115.684,-	1.071.456,-

Upaya penghematan penggunaan Sumberdaya air dilakukan dengan cara : pemeriksaan kebocoran tanki, penggantian pipa instalasi air yang bocor dan kran-kran air secara berkala, penjadwalan pengisian tanki air, pemasangan pelampung pada tanki penampungan air dan himbauan bagi para pegawai menutup kran air pada saat yang bersangkutan akan keluar dari kamar mandi/toilet. Upaya penghematan lainnya adalah penggunaan kembali kertas bekas pakai pada balik halaman yang masih kosong untuk melakukan pencetakan *draft* laporan, absensi manual, memo presensi, penempelan bon bukti belanja pada lampiran SPJ dan sebagainya.

Pada Tabel Rincian Revisi di bawah ini, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 telah terjadi beberapa kali Revisi Anggaran dalam rangka efisiensi/penghematan dan *refocussing* anggaran, serta dalam rangka peningkatan efektivitas anggaran di BPS Kabupaten Bandung. Rincian revisi perubahan PAGU Anggaran dari awal sampai dengan akhir tahun sebanyak 11 kali revisi anggaran dengan 4 kali revisi pengurangan anggaran, 3 kali revisi penambahan anggaran dan 4 kali revisi penyesuaian/pergeseran rincian anggaran,.

Pada revisi DIPA ke-1 pada bulan Februari 2021 terjadi efisiensi/penghematan anggaran atau Pengurangan PAGU sekitar 3,6 milyar rupiah yang semula Rp. 17.963.852.000,- menjadi Rp. 14.324.208.000,-. Penghematan ini dilakukan berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-025/01000/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penghematan Anggaran Tahun 2021.

Pada bulan April 2021 terjadi revisi antar satker se Jawa Barat karena adanya pemindahan anggaran kegiatan dari BPS Provinsi Jawa Barat ke BPS Kabupaten/Kota melalui Revisi DIPA ke-3, sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 745.048.000,- dengan Pagu semula Rp. 14.324.208.000,- menjadi Rp. 15.069.256.000,-.

Tabel 26. Rincian Revisi DIPA Anggaran Tahun 2021

Revisi Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	19 Februari 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran akibat Perubahan sampel	17.963.852.000	14.324.208.000	-3.639.644.000	DJA
02	17 Maret 2021	Revisi DIPA	14.324.208.000	14.324.208.000	0	DJPB
03	7 April 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Jawa Barat	14.324.208.000	15.069.256.000	745.048.000	DJPB
04	10 Juni 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran	15.069.256.000	12.485.147.000	-2.584.109.000	DJA
05	7 Juli 2021	Revisi DIPA	12.485.147.000	12.485.147.000	0	DJPB
06	29 Juli 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran akibat Refocusing Anggaran	12.485.147.000	8.705.276.000	-3.779.871.000	DJA
07	12 Agustus 2021	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran akibat Perubahan sampel	8.705.276.000	7.813.999.000	-891.277.000	DJA
08	8 Oktober 2021	Revisi DIPA Optimalisasi anggaran ke Belanja Modal	7.813.999.000	8.026.755.000	212.756.000	DJA

Revisi Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
09	25 November 2021	Revisi DIPA Optimalisasi anggaran ke Belanja Modal	8.026.755.000	8.026.755.000	0	DJPB
10	4 Desember 2021	Revisi DIPA Antar Satker karena kegiatan SEPBS 2021	8.026.755.000	8.791.809.000	765.054.000	DJA
11	22 Desember 2021	Revisi Penyesuaian Rincian POK	8.791.809.000	8.791.809.000	0	DJPB

Naiknya pagu anggaran di atas tidak berlangsung lama karena pada bulan Juni 2021 berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-106/01000/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan BPS Tahun Anggaran 2021, kembali terjadi efisiensi/penghematan anggaran atau Pengurangan PAGU yang semula Rp. 15.069.256.000,- menjadi Rp. 12.485.147.000,- atau berkurang sekitar 2,5 milyar rupiah melalui revisi DIPA ke-4 tanggal 10 Juni 2021. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran negara/*refocusing* anggaran untuk biaya penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-191/1000/PR.00/07/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang *Refocussing* Anggaran Tahun Anggaran 2021, terjadi lagi penghematan anggaran sebesar Rp. 3.779.871.000,- dengan Pagu semula Rp. 12.485.147.000,- menjadi Rp. 8.705.276.000,- pada revisi DIPA ke-6 yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2021.

Pada bulan Agustus 2021, berdasarkan Surat dari Kepala BPS Nomor : B-191/1000/PR.00/07/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang *Refocussing* Anggaran Tahun Anggaran 2021 tahap IV, kembali terjadi penghematan anggaran kembali sebesar Rp. 891.277.000,- dengan Pagu semula Rp. 8.705.276.000,- menjadi Rp. 7.813.999.000,- pada revisi DIPA ke-7 yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 2021.

Dalam rangka optimalisasi anggaran untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sisa anggaran yang tersisa/tidak terserap dari kegiatan pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), pada tahun 2021 BPS Kabupaten telah mengajukan 2 (dua) kali pengajuan usulan optimalisasi sisa anggaran PPIS menjadi belanja Barang Modal (BMN) ke Sekretaris Utama BPS RI.

Usulan optimalisasi dan efisiensi anggaran yang pertama diajukan melalui surat Kepala BPS Kabupaten Bandung Nomor B217/BPS/3204/09/2021 tanggal 13 September 2021 Tentang Permohonan Ijin Usulan Revisi DIPA ke DJA terkait dengan ijin revisi untuk optimalisasi belanja modal (dengan memunculkan Kegiatan baru : 2901 -Pengembangan Sistem Informasi Statistik), pergeseran rincian belanja pegawai dan realokasi anggaran biaya kegiatan Covid-19. Hasil persetujuan usulan revisi ini, dengan pengesahan revisi ke-8 dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) tanggal 8 Oktober 2021, dengan pergeseran/optimalisasi anggaran untuk pembelanjaan 10 buah Personal Computer (PC), 4 buah Laptop, 1 buah kamera dan 1 buah Printer dengan Pagu belanja BMN sebesar Rp. 404.499.000. Selain itu juga pada revisi ke-8 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 212.756.000,- untuk kegiatan Pra Pemutakhiran SP2020 Long Form, sehingga Pagu semula Rp. 7.813.999.000,- menjadi Rp. 8.026.755.000,-.

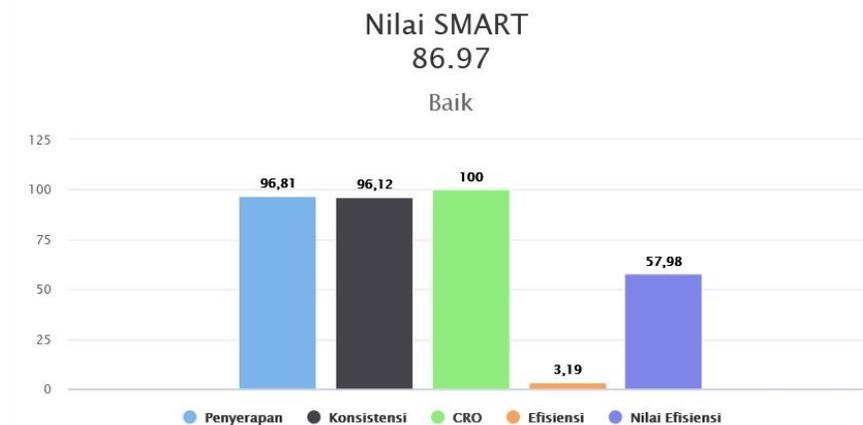
Usulan optimalisasi anggaran yang kedua diajukan melalui Surat Kepala BPS Kabupaten Bandung Nomor B-257/BPS/3204/11/2021 tanggal 8 November 2021 Tentang Permohonan Ijin Usulan Revisi DIPA Belanja BMN ke Sestama dan setelah keluar surat persetujuan dari Sestama BPS Nomor B-1043/02100/PR.440/11/2021 18 November 2021 diajukan Revisi ke 9 ke Kanwil DJPB dengan tanggal Pengesahan 25 November 2021 dengan penambahan Pagu belanja Modal/BMN sebesar Rp. 160.114.000,- untuk penambahan belanja 6 buah Personal Computer (PC), 1 buah Laptop, 1 buah Tablet dan 5 buah eksternal Harddisk.

Pada akhir tahun terjadi lagi penambahan anggaran kegiatan karena adanya kegiatan yang bersifat *ad hock* yaitu Susenas Rumah tangga Desember 2021 atau Survei

Efektivitas Penerima Bantuan Sosial 2021 (SEPBS2021) sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 765.054.000,- dengan Pagu semula Rp. 8.026.755.000,- menjadi Rp. 8.791.809.000,-.

Selama tahun 2021 berdasarkan proses Revisi DIPA di atas, BPS Kabupaten Bandung telah melaksanakan penghematan/*refocussing* anggaran sebesar Rp. 9.172.043.000,- dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas penggunaan anggaran belanja, dan penghematan anggaran negara /*Refocusing* anggaran untuk biaya penanganan pandemi Covid-19, dengan Pagu awal tahun Rp. 17.963.852.000,- menjadi Rp. 8.791.809.000,- pada akhir tahun.

Berdasarkan hasil penilaian pada *dashboard* Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan, nilai efisiensi anggaran satker BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2021 adalah sebesar 57,98 %, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 18. Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

Kinerja Anggaran Tahun 2021

Pagu yang diberikan Pemerintah untuk satker BPS Kabupaten Bandung dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang Statistik, sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.791.809.000,-. Anggaran kegiatan 2021 tersebut diarahkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Nasional BPS. Badan Pusat Statistik memiliki 4 (empat) program anggaran, namun pada satker BPS Kabupaten Bandung sendiri tahun anggaran 2021 ini hanya terdapat 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dibidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.
2. Program Dukungan Manajemen BPS (Dukman). Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan Kapasitas SDM; (b) Penataan Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*; dan (c) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Nilai Pagu anggaran pada tahun 2021 mengalami penurunan Pagu Anggaran sebesar 47,67 persen atau berkurang sebesar Rp. 8.008.603.000,-, jika dibandingkan dengan nilai pagu anggaran pada tahun 2020 (sebesar Rp. 16.800.412.000,-). Hal ini dapat dilihat pada tabel rincian perbandingan Pagu anggaran tahun 2019 dan 2021 menurut program di bawah ini. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan Pagu anggaran terbesar terdapat pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), yaitu turun sebesar Rp. 7.473.693.000 atau turun 67,78 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang banyak melibatkan para petugas Mitra Statistik, dengan pagu anggaran SP2020 sebesar Rp. 9.295.816. 000,-.

**Tabel 27. Perbandingan Pagu Anggaran
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021**

Jenis Program	PAGU akhir Tahun 2020 (Rp.)	PAGU akhir Tahun 2021 (Rp.)	Selisih (Rp.)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen (Dukman)	5.773.450.000	5.238.540.000	- 534.910.000	- 9,26
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	11.026.962.000	3.553.269.000	- 7.473.693.000	- 67,78
Jumlah	16.800.412.000	8.791.809.000	3.194.588.000	- 47,67

Pada tahun ini hal yang sama terjadi juga pada Program Dukungan Manajemen (Dukman) atau pada tahun-tahun sebelumnya lebih dikenal sebagai Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). Pagu anggaran Program Dukman tahun 2021 turun sebesar 9,26 % atau turun senilai .Rp. 534.910.000,- .

Berdasarkan Tingkat Penyerapan anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2021 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan adalah sebesar 96,86 persen dari total pagu tersedia. Rincian realisasi daya serap anggaran menurut program, masing masing adalah sebagai berikut : 99,19 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan 93,43 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Rincian Realisai Penyerapan anggaran tahun 2021 pada Program Dukungan Manajemen dibandingkan dengan penyerapan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 28. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2021 Menurut Program

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Persen tase Sisa (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Dukungan Manajemen (Dukman)	5.238.540.000	5.195.875.071	99,19	42.664.929	0,81
Program dan Penyediaan Informasi dan Pelayanan Statistik (PPIS)	3.553.269.000	3.319.921.527	93,43	233.347.473	6,57
Total	8.791.809.000	8.515.796.598	96,86	276.012.402	3,14

Jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan daya serap anggaran sebesar 2,21 persen. Capaian kinerja anggaran berdasarkan persentase daya serap anggaran total pada tahun 2021 sebesar 96,86 persen. Peningkatan daya serap anggaran berasal dari kontribusi peningkatan daya serap anggaran Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar 8,61 persen, sedangkan pada Program Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terjadi penurunan daya serap anggaran sebesar 3,35 persen.

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2020-2021 Menurut Program

Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Selisih Realisasi (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Dukungan Manajemen (Dukman)	5.773.450.000	5.229.456.103	90,58	5.238.540.000	5.195.875.071	99,19	8,61

Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Selisih Realisasi (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	11.026.962.000	10.672.433.716	96,78	3.553.269.000	3.319.921.527	93,43	-3,35
Total	16.800.412.000	15.901.889.819	94,65	8.791.809.000	8.515.796.598	96,86	2,21

Adanya penurunan daya serap anggaran pada Program Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) ini disebabkan masih terdapat sisa anggaran yang relatif cukup besar, yaitu senilai Rp. 233.347.473,- akibat terjadinya perubahan rencana dan metode kegiatan dalam penyelenggaraan pelatihan maupun pelaksanaan kegiatan pada beberapa kegiatan survei yang menyebabkan anggaran tersisa cukup banyak. Kegiatan Susenas Rumah tangga Desember 2021 atau Survei Efektivitas Program bantuan Sosial 2021 yang disenggarakan pada bulan Desember 2021 menyisakan anggaran paling besar, yaitu senilai Rp. 183.947.922,- dan sisanya sebesar Rp. 49.399.551 tersisa dari berbagai sumber kegiatan pada Program Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 30 berikut.

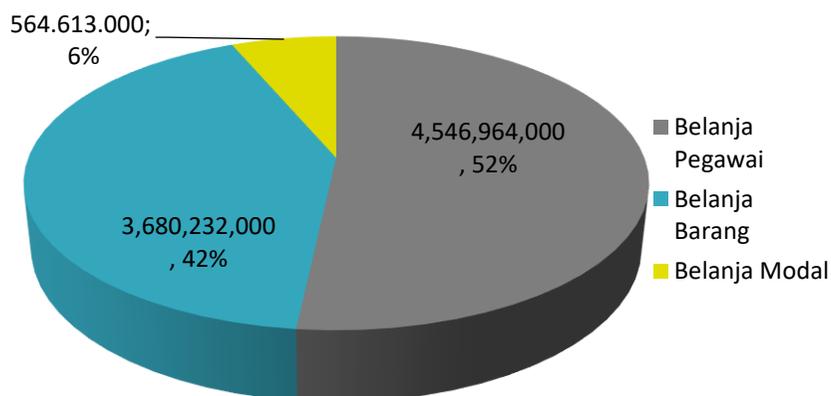
Tabel 30. Realisasi Penyerapan Anggaran Program PPIS Menurut Rincian Output Kegiatan

Kode RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Sisa
2897.BMA	Diseminasi Dan Metadata Statistik	6.700.000	6.112.000	91,22	588.000
2898.BMA	Statistik Neraca Pengeluaran	27.643.000	27.413.881	99,17	229.119
2899.BMA	Statistik Neraca Produksi	7.360.000	7.243.900	98,42	116.100
2900.BMA	Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei	936.000	924.000	98,72	12.000
2901.BMA	Pengembangan Informasi Statistik	537.813.000	531.133.000	98,76	6.680.000
2902.BMA	Statistik Distribusi	6.029.000	6.029.000	100,00	-
2903.BMA	Statistik Harga	180.587.000	176.599.800	97,79	3.987.200
2904.BMA	Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi	279.911.000	273.258.300	97,62	6.652.700

Kode RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Sisa
2905.BMA	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	195.021.000	194.811.017	99,89	209.983
2905.QMA	Sensus Penduduk	412.367.000	407.921.846	98,92	4.445.154
2906.BMA	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	1.135.727.000	951.779.078	83,80	183.947.922
2907.BMA	Statistik Ketahanan Sosial	108.839.000	108.324.362	99,53	514.638
2908.BMA	Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata	54.388.000	52.395.000	96,34	1.993.000
2909.BMA	Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan	69.281.000	68.936.201	99,50	344.799
2910.BMA	Statistik Hortikultura Dan Perkebunan	134.415.000	124.558.500	92,67	9.856.500
2910.QMA	Statistik Tanaman Pangan	396.252.000	382.481.642	96,52	13.770.358
	JUMLAH	3.553.269.000	3.319.921.527	93,43	233.347.473

Berdasarkan komposisi alokasi pagu anggaran BPS Kabupaten Bandung akhir tahun 2021 menurut jenis belanja terhadap total Pagu Belanja, pagu anggaran tertinggi terdapat pada anggaran belanja pegawai sebesar 52 persen dan pagu anggaran terendah pada pagu anggaran belanja modal sebesar 6 persen. Sedangkan pagu anggaran belanja pegawai mencapai 42 persen.

Pagu anggaran belanja modal pada awal tahun belum tersedia dan adanya anggaran belanja modal di BPS kabupaten Bandung merupakan hasil optimalisasi dan efisiensi sisa anggaran Program PPIS pada bulan Oktober dan November 2021.



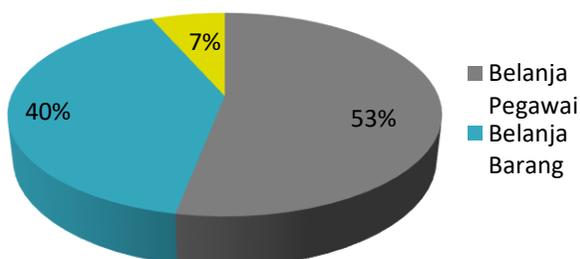
Gambar 19. Komposisi Alokasi Anggaran menurut Jenis Belanja terhadap Total Pagu BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

Perbandingan tingkat penyerapan anggaran terhadap Pagu masing-masing jenis belanja menurut jenis belanja pada tahun 2021, persentase daya serap anggaran tertinggi terdapat pada Belanja Pegawai sebesar 99,32 persen, disusul dengan belanja Modal sebesar 98,82 persen dan nilai daya serap paling rendah pada jenis belanja barang sebesar 93,52 persen.

Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2021 Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Sisa (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51. Belanja Pegawai	4.546.964.000	4.516.059.951	99,32	30.904.049	0,68
52. Belanja Barang	3.680.232.000	3.441.203.647	93,52	239.028.353	6,48
53. Belanja Modal	564.613.000	557.933.000	98,82	6.680.000	1,18
Total	8.791.809.000	8.515.196.598	96,86	276.612.402	3,14

Komposisi Realisasi nilai belanja per jenis belanja tahun 2021 terhadap nilai realisasi belanja total di BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2021 masing-masing adalah sebesar 53 persen untuk belanja pegawai, 40 persen untuk belanja barang dan sisanya 7 persen untuk belanja modal.



Gambar 20. Komposisi Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong setiap satuan kerja (satker) yang berada pada setiap Kementerian/Lembaga (K/L), untuk senantiasa meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan dari seluruh anggaran belanja yang telah dialokasikan harus diarahkan untuk dapat mencapai target kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap satuan kerjanya setiap tahun. Adapun alokasi anggaran tahun 2021 yang tersedia, berdasarkan rincian Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel 32 di bawah ini.

Tabel 32. Alokasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021 Menurut Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS 1.1 Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	3.007.820.000	2.781.752.527	92,48	226.067.473
SS 2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	6.700.000	6.112.000	91,22	588.000
SS 3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	538.749.000	532.057.000	98,76	6.692.000
SS 4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	5.238.540.000	5.195.875.071	99,19	42.664.929
Total	8.791.809.000	8.515.796.598	96,86	276.012.402

Capaian Realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Sasaran Strategis keempat, yaitu SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan mencapai 99,19 persen. Dari Pagu yang tersedia sebesar Rp. 5.238.540.000,- dapat terserap sebesar Rp. 5.195.875.071,-.

Sebaliknya Realisasi anggaran terendah dicapai oleh Sasaran Strategis kedua, yaitu Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN, yang hanya dapat mencapai realisasi sebesar 91,22 persen. Dari Pagu yang tersedia sebesar Rp. 6.700.000,- dapat terserap sebesar Rp. 6.112.000,-.

Tabel 33. Efisiensi Anggaran berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran terhadap Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS 1.1 Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	88,36	2.781.752.527	92,48	- 4,67
SS 2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	100,00	6.112.000	91,22	8,78
SS 3.1 Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I	100,00	532.057.000	98,76	1,24
SS 4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	109,92	5.195.875.071	99,19	9,77
Total	8.791.809.000	8.515.796.598	96,86	2,72

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2021, dihitung dengan membandingkan antara realisasi penyerapan anggaran dengan capaian kinerja Sasaran Strategis yang dapat dilihat pada tabel 33. Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa Tingkat efisiensi anggaran tertinggi dicapai oleh sasaran strategis keempat yaitu SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan nilai efisiensi sebesar 9,77 persen. Hal ini dapat dilihat dari selisih capaian dimana persentase capaian kinerja yang dicapai oleh sasaran strategis tersebut di tahun 2021 sebesar 109,92 persen sedangkan capaian realisasi anggarannya hanya sebesar 99,19 persen.

Selanjutnya nilai efisiensi kedua tertinggi dicapai oleh tujuan strategis kedua, yaitu Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan nilai efisiensi sebesar 8,78 persen. Urutan tingkat efisiensi berikutnya yaitu dicapai oleh sasaran ketiga, yaitu Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I dengan nilai efisiensi sebesar 1,24 persen. Sedangkan tingkat efisiensi terendah dicapai oleh sasaran pertama yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas sebesar -4,67 persen.

Berdasarkan tabel 33 di atas, secara keseluruhan tingkat efisiensi anggaran berdasarkan rata-rata capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2021 mencapai nilai sebesar 2,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BPS Kabupaten Bandung dapat menggunakan anggaran secara efektif dan berhasil melakukan efisiensi penganggaran dalam mencapai target kinerja tahun 2021 sesuai tujuan dari sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Namun demikian, perlu kerja keras bersama untuk mendongkrak nilai capaian kinerja sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas agar lebih meningkatkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja bagi satuan kerja BPS Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2018 kementerian Keuangan melalui Sistem Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), telah mulai melakukan Penilaian Kinerja dalam pelaksanaan anggaran seluruh satker yang berada di setiap Kementerian dan Lembaga pemerintah Pusat setiap bulan, terkait dengan kepatuhan satker terhadap pemenuhan jadwal dan ketertiban pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku, melalui 4 (empat) aspek penilaian dan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA), yang terdiri dari aspek penilaian dan Indikator penilaian sebagai berikut :

Aspek Penilaian IKPA	Indikator Penilaian IKPA
1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA
	Deviasi Halaman III DIPA
	Pagu Minus
2. Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data Kontrak
	Pengelolaan UP dan TUP
	LPJ Bendahara
	Dispensasi SPM
3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran
	Penyelesaian Tagihan
	Capaian Output
	Retur SP2D
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas
	Kesalahan SPM

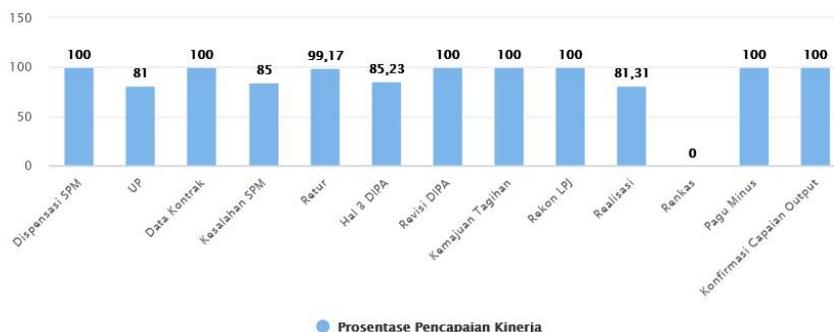
Pada tahun 2021 penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI terhadap seluruh satker secara rutin dengan perhitungan kumulatif setiap bulan terhadap 12 indikator IKPA dan untuk sementara Indikator Renkas belum dilakukan penilaian. Hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh setiap satuan kerja yang dapat diakses melalui Sistem Aplikasi OM-SPAN pada alamat website <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan hasil pengukuran **Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)** tahun 2021, BPS Kabupaten Bandung memperoleh Nilai akhir IKPA yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar **93,84 %**. Pada Tahun 2020 Nilai IKPA BPS Kabupaten Bandung adalah sebesar **82,64 %**, sehingga pada tahun ini terjadi peningkatan nilai IKPA sebesar 11,20 %.

Rincian hasil penilaian terhadap aspek maupun indikator IKPA 2021 adalah sebagai berikut :

1. Nilai **Aspek Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran** adalah sebesar **95,08 %**, yang berasal dari nilai capaian kinerja Indikator : Revisi DIPA sebesar 100 %, Deviasi Halaman III DIPA sebesar 85,23 % dan Pagu Minus sebesar 100 %.
2. Nilai **Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi** adalah sebesar **95,25 %**, yang terdiri dari nilai capaian kinerja Indikator : Data Kontrak sebesar 100 %, Pengelolaan UP-TUP sebesar 81 %, LPJ Bendahara sebesar 100 % dan Dispensasi sebesar 100 %.
3. Nilai **Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan** adalah sebesar **95,12 %**, yang berasal dari nilai capaian kinerja Indikator : Penyerapan Anggaran sebesar 81,31%, Penyelesaian Tagihan sebesar 100 % , Capaian *Output* sebesar 100 % dan Retur SP2D sebesar 99,17 %.
4. Nilai **Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan** adalah sebesar **85 %**, yang berasal dari nilai capaian kinerja Indikator Kesalahan SPM sebesar 85 %.

Nilai IKPA
93.84



Gambar 21. Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

Hasil penilaian secara lengkap baik rincian aspek, indikator, nilai bobot maupun nilai akhir penilaian IKPA BPS Kabupaten Bandung tahun 2021 tersaji pada tabel 34 berikut .

Tabel 34. Hasil Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

Aspek/ Indikator IKPA		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100	5	5	95,08
	Deviasi Halaman III DIPA	85,23	5	4,26	
	Pagu Minus	100	5	5	
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data Kontrak	100	10	10	95,25
	Pengelolaan UP dan TUP	81	8	6,48	
	LPJ Bendahara	100	5	5	
	Dispensasi SPM	100	5	5	
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	81,31	15	12,2	95,12
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Capaian Output	100	17	17	
	Retur SP2D	99,17	5	4,96	
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas	0	0	0	85
	Kesalahan SPM	85	5	4,25	
Nilai Total		89,15			
Konversi Bobot		95%			
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		93,84			

Hasil penilaian IKPA tahun 2021 pada 7 (tujuh) yaitu : **Revisi DIPA, Pagu Minus, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyelesaian Tagihan dan Konfirmasi Capaian Output** telah mencapai nilai maksimal bobot penilaian masing-masing indikator sebesar 100 % , dan untuk Retur SP2D sebesar 99,17 % (sudah mendekati nilai 100%). Sedangkan untuk 4 (empat) indikator lainnya masih berada di bawah 90 % , sehingga perlu kerja keras seluruh pemangku kepentingan agar dapat lebih ditingkatkan lagi capaian kinerjanya di tahun yang akan datang

Tabel 34 di atas memperlihatkan perbandingan hasil penilaian IKPA tahun 2020 dengan hasil penilaian IKPA 2021. Beberapa hal yang cukup menggembirakan pada capaian nilai IKPA tahun 2021 ini adalah :

- Terdapat 5 (lima) indikator IKPA memiliki nilai IKPA yang tetap baik (100 %)
- Terjadinya peningkatan nilai IKPA pada 4 (empat) indikator IKPA, yaitu : Indikator **Deviasi Hal III DIPA** (naik 25,89 %), **Data Kontrak** (naik 33 %), **Penyerapan Anggaran** (naik 10,37 %) dan **Penyelesaian Tagihan** (naik 33,33 %)

Namun disamping keberhasilan di atas, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan lagi nilai capaian kinerjanya, yaitu pada :

- Indikator **Kesalahan SPM** meskipun tidak mengalami penurunan nilai IKPA tapi masih memiliki nilai yang belum optimal (85 %)
- Terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan hasil penilaian IKPA yaitu pada **Pengelolaan UP & TUP** (turun 14%), dan **Retur SP2D** (turun 0,83 %)

Hasil penilaian IKPA tahun 2020 dan hasil penilaian IKPA 2021 sebelum bobot tertimbang masing-masing sebesar 78,51 % dan 89,15 % , sehingga terjadi peningkatan sebesar 10,64 % dan setelah adanya bobot tertimbang nilai hasil akhir tahun 2021 menjadi sebesar 93,84 % atau naik sebesar 11,20 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 35. Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021

No	Jenis Penilaian	Nilai	2020		2021		Selisih Nilai	
			Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai	Bobot (%)		Nilai Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Revisi DIPA	100	5	5	100	5	5	0
2	Deviasi Hal III DIPA	59,34	5	2,97	85,23	5	4,26	25,89
3	Pagu Minus	100	5	5	100	5	5	0
4	Data Kontrak	67	15	10,05	100	10	10	33
5	Pengelolaan UP & TUP	95	8	7,6	81	8	6,48	-14
6	LPJ Bendahara	100	5	5	100	5	5	0
7	Dispensasi SPM	100	5	5	100	5	5	0
8	Penyerapan Anggaran	70,94	15	10,64	81,31	15	12,2	10,37
9	Penyelesaian Tagihan	66,67	12	8	100	10	10	33,33
10	Konfirmasi Capaian Output	100	10	10	100	17	17	0
11	Retur SP2D	100	5	5	99,17	5	4,96	-0,83
12	Renkas	-	-	-	-	-	-	-
13	Kesalahan SPM	85	5	4,25	85	5	4,25	0
Nilai Total				78,51			89,15	10,64
Konversi Bobot (%)				95%			95%	-
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)				82,64			93,84	11,2

Terjadinya peningkatan nilai akhir IKPA tahun 2021, sehingga mendapat nilai yang relatif baik menjadi di atas 90%, tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras dari seluruh pihak yang kepentingan dalam pengelolaan anggaran di BPS Kabupaten Bandung. Hasil ini menunjukkan bahwa satker BPS Kabupaten Bandung sudah termasuk dalam kategori penilaian satker yang telah melaksanakan anggaran dengan relatif baik, meskipun pada beberapa indikator masih ada beberapa catatan penilaian IKPA yang masih dibawah nilai 90,00 sehingga masih perlu lebih ditingkatkan lagi kinerja pengelolaannya.

Penghargaan atas Prestasi yang diperoleh Tahun 2021

Pada tahun 2021 satker BPS Kabupaten Bandung telah memperoleh beberapa penghargaan atas prestasi kinerja baik para pegawai BPS Kabupaten Bandung dalam penyelesaian tugas dan fungsinya. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dengan rincian Piagam penghargaan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Piagam Penghargaan ***Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Softcopy dan Hardcopy) paling awal periode Triwulan I (Januari, Februari, Maret) Tahun Anggaran 2021***. Diberikan oleh KPPN Bandung II pada tanggal 12 April 2021.
2. Piagam penghargaan sebagai ***Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021***. Diberikan oleh BPS Pusat pada tanggal 12 Juli 2021
3. Piagam Penghargaan pencapaian sebagai ***BPS Kabupaten/Kota dengan Sampel Terbanyak dan selesai tepat waktu dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2021.
4. Piagam Penghargaan sebagai ***BPS Kabupaten/Kota dengan Sampel Terbanyak dan selesai tepat waktu dalam menyelesaikan kegiatan Listing***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 November 2021.
5. Piagam Penghargaan ***Satker Terbaik Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 milyar rupiah***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 22 Desember 2021

-
6. Piagam Penghargaan ***Satker Terbaik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 Milyar Rupiah***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 22 Desember 2021
 7. Piagam Penghargaan ***Satker Terbaik Bidang Statistik Sosial Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 Milyar Rupiah***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2021
 8. Piagam Penghargaan sebagai ***Unit Kerja dengan Manajemen dan Output Terbaik dalam Program 100 Desa Cinta Statistik Tahun 2021***. Diberikan oleh BPS Pusat pada tanggal 6 Desember 2021.
 9. Piagam Penghargaan sebagai ***Peringkat II Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Tahun Anggaran 2021***. Diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II pada tanggal 31 Januari 2022.

PENUTUP

Tinjauan Umum

Empat tujuan yang harus dicapai oleh BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2021 diantaranya adalah: (1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan; (2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN; (3) Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dan (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Secara umum capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2021 relatif tercapai dengan baik. Rata-rata capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung mencapai 99,51 persen. Sebanyak tiga dari empat tujuan kinerja terhitung mencapai 100 persen atau lebih, dengan demikian hanya tinggal satu tujuan yang masih belum mencapai 100 persen.

Hal yang sama juga terlihat dalam perkembangan capaian kinerja terhadap target renstra tahun 2024. Dua dari empat tujuan kinerja telah berhasil melampaui target akhir renstra dalam waktu dua tahun kinerja periode renstra 2020-2024. Sementara dua tujuan sisanya masing-masing telah mencapai 50 dan 80 persen dari target akhir renstra.

Dilihat dari sisi anggaran, secara keseluruhan tingkat efisiensi anggaran berdasarkan rata-rata capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2021 mencapai nilai sebesar 2,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BPS Kabupaten Bandung dapat menggunakan anggaran secara efektif dan

berhasil melakukan efisiensi penganggaran dalam mencapai target kinerja tahun 2021 sesuai tujuan dari sistem penganggaran yang berbasis kinerja.

Berbagai penghargaan yang diterima oleh BPS Kabupaten Bandung merupakan bukti kinerja BPS Kabupaten Bandung yang dinilai baik oleh pihak eksternal, namun demikian BPS Kabupaten Bandung tetap harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya menjadi semakin baik dan berkinerja tinggi.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah :

- (1) Perlu usaha dan sosialisasi yang lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tujuan pertama, dengan indikator sasaran persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dengan cara terus meningkatkan kualitas pelayanan data terutama untuk pihak eksternal.
- (2) Perlu usaha dan koordinasi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tujuan keempat, dengan indikator hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat dengan cara memperbaiki sistem kerja, memenuhi kelengkapan arsip dokumentasi, dan memperbaiki format laporan kinerja sesuai dengan masukan dari inspektorat.
- (3) Melakukan penajaman (peningkatan) target kinerja pada beberapa indikator sasaran yang telah memiliki capaian kinerja jauh di atas 100 persen. Penajaman target kinerja ini disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi nilai realisasi pada tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi. Usaha penajaman (peningkatan) target kinerja diharapkan akan menjadi pendorong bagi para pegawai BPS Kabupaten Bandung untuk dapat berkinerja jauh lebih baik lagi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2021-2024

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2021	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas					
Indikator :					
Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	75%	78%	80%	83%	85%
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					
SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN					
Indikator :					
Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	3,1	3,1	3,5	4,0	5,0
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
SS.3. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I					
Indikator :					
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	10	12	15	18	20

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2021	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

T.4. Penguatan Tata Kelola
Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

SS.3. SDM Statistik Yang Unggul dan
Berdaya Saing Dalam Kerangka Tata
Kelola Kelembagaan

Indikator :

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	61,2	61,3	61,4	61,5	61,6
--	------	------	------	------	------

Lampiran 2. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Hartadi, S.ST, M.E
Jabatan : Kepala BPS Kabupaten Bandung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dyah Anugrah Kuswardani MA
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

(Dyah Anugrah Kuswardani MA.)
NIP. 196203141985012001

Soreang, 31 Maret 2021
Pihak Pertama

(Agung Hartadi, S.ST, M.E)
NIP. 197509091994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BPS KABUPATEN BANDUNG

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	92
	Persentase publikasi statistik yang mencrapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100
	Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	44,12
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	69,5
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	75

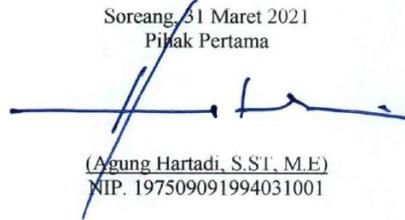
Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen	Rp. 5.491.028.000,-
2. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 8.833.180.000,-

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat



(Dyah Anugrah Kuswardani, MA)
NIP. 19620314 198501 2 001

Soreang, 31 Maret 2021
Pihak Pertama



(Agung Hartadi, S.ST, M.E)
NIP. 197509091994031001

Lampiran 3. Rincian SDM ASN BPS Kabupaten Bandung akhir 2021

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan						Total
		SMP	SMA	D3	DIV/S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Staf dan Struktural							
1	Kepala BPS Kabupaten					1		1
2	Subbag Tata Usaha		2	1	2			5
3	Seksi Statistik Sosial				2	1		3
4	Seksi Statistik Produksi		1			2		3
5	Seksi Statistik Distribusi				1	1		2
6	Seksi Nerwilis				1	1		2
7	Seksi IPDS			1	1	1		3
Sub Jumlah A		0	3	2	7	7	0	19
B	Petugas Lapangan							
1	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)		4	1	10			15
Sub Jumlah B		0	4	1	10	0	0	15
Jumlah Total		0	7	3	18	6	0	34

Lampiran 4. Jadwal Kegiatan Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung 2021

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Statistik Sosial													
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	√	√										
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran		√										
3	Updating listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan								√				
4	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan								√				
6	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021		√										
7	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021			√									
9	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021									√			
10	Survei Statistik Polkam			√	√	√							
11	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2021			√									
12	Pendataan Potensi Desa (PODES2021- Desa)						√	√					
13	Pendataan Potensi Desa (PODES2021- Kecamatan)						√						
14	Pendataan Potensi Desa (PODES2021-						√						

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kabupaten												
15	Sensus Penduduk 2021										√	√	
Statistik Produksi													
1	Updating Direktori Industri Besar-Sedang (IBS)	√	√	√	√	√							
2	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Tahunan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Listing								√				
5	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan								√	√			
6	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Listing			√									
7	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan	√			√			√			√		
8	Survei Kerangka Sampel Area (KSA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Survei Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Survei Peternakan Tahunan (LTS)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11	Survei Peternakan Tahunan (LTT)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
12	Survei Peternakan Tahunan (LTU)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
13	Survei Tanaman Pangan/Ubina Listing				√				√				√
14	Survei Tanaman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pangan/Ubinan Pencacahan												
15	Survei Hortikultura		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
16	Survei Konstruksi Triwulanan				√			√			√		√
17	Survei Konstruksi Tahunan		√	√	√	√	√	√	√	√	√		
18	Survei SP-Lahan	√											
19	Survei SP- Benih	√											
20	Survei SP- Alsin	√											
21	Survei SP Padi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22	Survei SP Palawija	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Survei SPH-Lahan	√											√
24	Survei SPH- SBS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
25	Survei SPH-BST	√			√			√			√		√
26	Survei SPH-TH	√			√			√			√		√
27	Survei SPH-TBF	√			√			√					√
28	Survei SPH-Benih	√											√
29	Survei LITBANG			√	√	√	√	√	√	√	√	√	
30	Survei Kostruksi Tahunan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
31	Survei Kostruksi TRIWULANAN				√			√			√		
32	Updating Direktori Konstruksi		√	√	√	√							
33	Survei Captive Power		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
34	Survei Penggalian Berbadan Hukum		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
35	Survei Penggalian Usaha Ruamahtangga (URT)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
36	Survei Energi Listrik		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Statistik Distribusi													
1	PJ/AJR				√	√	√	√	√				
2	PAW					√	√	√	√	√			
3	POLDIS					√	√	√	√	√			
4	STKU	√			√			√			√		
5	HD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	HKD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	SHPI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	HPS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	HPG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	HPBG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	HPT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	HPJ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	SHPB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	IKK	√			√			√			√		
15	SBH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	BUMD				√	√	√	√	√	√			
17	K2				√	√	√	√	√	√			
18	K3				√	√	√	√	√	√			
19	UPD Dir Par	√	√	√									
20	VHTS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	VHTL				√	√	√	√	√	√			
22	VDTW				√	√	√	√	√	√			
23	Vrest				√	√	√	√	√	√			
24	BCS				√	√	√	√	√	√			
25	SLK				√	√	√	√	√	√			

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	PBJ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik													
1	Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha	√	√	√	√								
2	Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran	√	√	√	√								
3	Penyusunan Statistik Daerah								√	√			
4	Penyusunan Inkesra										√	√	
5	Survei Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan (SKTNPB)	√			√			√			√		
7	SKPR Dinas	√											
8	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)				√			√			√		√
9	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPRT)				√			√			√		√
10	Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR)							√	√	√	√		
11	Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)							√	√	√			
12	Survei Khusus Neraca Produksi								√	√	√		
13	Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (SKPS)						√	√	√	√	√		
14	Pengumpulan data realisasi APBD	√			√			√			√		
15	Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)						√	√	√	√	√		
16	Survei Matriks Arus Komoditas (SMAK)						√	√	√	√	√		

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha						√	√	√	√	√		
18	Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ)								√	√	√		
19	Updating LNP								√	√			
20	Pengumpulan Data PDAM	√			√			√			√		
21	Pengumpulan Fenomena Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik													
1	Pengolahan Sakernas		√						√				
2	Pengolahan Susenas			√						√			
3	Clustering Peta BS			√	√	√							
4	Penyusunan DDA	√	√										
5	Penyusunan KCDA			√	√	√	√	√	√	√			
6	Pemutakhiran MFD						√	√				√	√
7	Pendataan SKD	√	√	√	√	√	√	√					
8	Pendataan Metadata		√	√	√	√	√	√	√				
9	Pengolahan SP2021						√	√					

Lampiran 5. Target – Realisasi Kegiatan/*Response Rate* Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung Tahun 2021

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
Statistik Sosial					
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	Dokumen	27	27	100
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	Dokumen	270	270	100
3	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan	Dokumen	1080	1080	100
4	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021	Dokumen	117	117	100
5	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021	Dokumen	1170	1170	100
6	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021	Dokumen	270	270	100
7	Survei Statistik Polkam	Dokumen	3	3	100
8	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2021	Dokumen	156	156	100
9	Pendataan Potensi Desa (PODES2021- Desa)	Dokumen	280	280	100
Statistik Produksi					
1	Updating Direktori Industri Besar-Sedang (IBS)	Dokumen	1616	1616	100
2	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Bulanan	Dokumen	384	264	68,75
3	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Tahunan	Dokumen	1141	668	58,54
4	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan	Dokumen	706	706	100
5	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan	Dokumen	428	428	100
6	Survei Kerangka Sampel Area (KSA)	Dokumen	2712	2712	100
7	Survei Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)	Dokumen	80	80	100
8	Survei Peternakan Tahunan (LTS)	Dokumen	2	2	100
9	Survei Peternakan Tahunan (LTT)	Dokumen	3	3	100
10	Survei Peternakan Tahunan (LTU)	Dokumen	4	4	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
11	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Listing	Dokumen	165	138	84,64
12	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Pencacahan	Dokumen	282	228	80,90
13	Survei Hortikultura	Dokumen	461	461	100
14	Survei Konstruksi Triwulanan	Dokumen	3	3	100
15	Survei SP-Lahan	Dokumen	31	31	100
16	Survei SP- Benih	Dokumen	31	31	100
17	Survei SP- Alsin	Dokumen	31	31	100
18	Survei SP Padi	Dokumen	372	372	100
19	Survei SP Palawija	Dokumen	372	372	100
20	Survei SPH-Lahan	Dokumen	31	31	100
21	Survei SPH- SBS	Dokumen	372	372	100
22	Survei SPH-BST	Dokumen	124	124	100
23	Survei SPH-TH	Dokumen	124	124	100
24	Survei SPH-TBF	Dokumen	124	124	100
25	Survei SPH-Benih	Dokumen	31	31	100
26	Survei LITBANG	Dokumen	10	10	100
27	Survei Kostruksi Tahunan	Dokumen	17	7	41,00
28	Updating Direktori Konstruksi	Dokumen	50	50	100
31	Survei Captive Power	Dokumen	33	33	100
32	Survei Penggalan Berbadan Hukum	Dokumen	12	7	58,30
33	Survei Penggalan Usaha Ruamahtangga (URT)	Dokumen	26	26	100
34	Survei Energi Listrik	Dokumen	2	2	100
Statistik Distribusi					
1	HP	Dokumen	852	817	95,89
2	HPJ	Dokumen	24	24	100
3	HPT	Dokumen	24	24	100
4	HPG	Dokumen	156	156	100
5	HPBG	Dokumen	84	84	100
6	SHPI	Dokumen	72	64	88,89
7	HD	Dokumen	216	216	100
8	HKD	Dokumen	72	72	100
9	HPB	Dokumen	300	300	100
10	VHTS	Dokumen	540	492	91,11

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
11	IKK	Dokumen	104	104	100
12	STKU	Dokumen	30	30	100
13	Updt Dir Hotel	Dokumen	53	53	100
14	VHTL	Dokumen	113	113	100
15	VDTW	Dokumen	52	50	94,29
16	VREST	Dokumen	29	27	81,31
17	SLK	Dokumen	43	43	87,14
18	POLDIS	Dokumen	17	35	100
19	PAW	Dokumen	60	60	100
20	APBD/K2	Dokumen	2	2	100
21	K3	Dokumen	30	30	100
22	BUMD	Dokumen	3	3	100
23	PJ/AJR	Dokumen	3	3	100
24	BCS	Dokumen	69	69	100
25	BOQ	Dokumen	1	1	100
26	SIPAREKRAF	Dokumen	95	76	80
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik					
1	Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha	Publikasi	1	1	100
2	Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran	Publikasi	1	1	100
3	Penyusunan Statistik Daerah	Publikasi	1	1	100
4	Penyusunan Inkesra	Publikasi	1	1	100
5	Survei Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan (SKTNPB)	Dokumen	20	20	100
6	SKPR Dinas	Dokumen	10	10	100
7	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)	Dokumen	120	120	100
8	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPR)	Dokumen	40	40	100
9	Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR)	Dokumen	10	10	100
10	Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)	Dokumen	6	6	100
11	Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP)	Dokumen	19	19	100
12	Survei Khusus Perusahaan Swasta	Dokumen	6	6	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
	Non Finansial (SKPS)				
13	Pengumpulan data realisasi APBD	Dokumen	12	12	100
14	Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)	Dokumen	30	30	100
15	Survei Matriks Arus Komoditas (SMAK)	Dokumen	25	25	100
16	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha	Dokumen	14	14	100
17	Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ)	Dokumen	6	6	100
18	Updating LNP	Daftar	10	10	100
19	Pengumpulan Data PDAM	Data	4	4	100
20	Pengumpulan Fenomena Triwulanan	Daftar	12	12	100
Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik					
1	Pengolahan Sakernas	Dokumen	1485	1485	100
2	Pengolahan Susenas	Dokumen	1.584	1.584	100
3	Clustering Peta BS	SLS	19.142	19.142	100
4	Penyusunan DDA	Publikasi	1	1	100
5	Penyusunan KCDA	Publikasi	31	31	100
6	Pemutakhiran MFD (Master File Desa)	Desa	2	2	100
7	Pendataan SKD (Survei Kebutuhan Data)	Dokumen	30	30	100
8	Pendataan Metadata	Dokumen	49	55	112,25

Lampiran 6. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2021

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
1	Kabupaten Bandung Dalam Angka 2021	Tahunan
2	Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2021	Tahunan
3	Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2021	Tahunan
4	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2021	Tahunan
5	Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2021	Tahunan
6	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2017-2021	Tahunan
7	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran 20-2017-2021	Tahunan
8	Kecamatan Ciwidey Dalam Angka 2021	Tahunan
9	Kecamatan Rancabali Dalam Angka 2021	Tahunan
10	Kecamatan Pasirjambu Dalam Angka 2021	Tahunan
11	Kecamatan Cimaung Dalam Angka 2021	Tahunan
12	Kecamatan Pangalengan Dalam Angka 2021	Tahunan
13	Kecamatan Kertasari Dalam Angka 2021	Tahunan
14	Kecamatan Pacet Dalam Angka 2021	Tahunan
15	Kecamatan Ibum Dalam Angka 2021	Tahunan
16	Kecamatan Paseh Dalam Angka 2021	Tahunan
17	Kecamatan Cikancung Dalam Angka 2021	Tahunan
18	Kecamatan Cicalengka Dalam Angka 2021	Tahunan
19	Kecamatan Nagreg Dalam Angka 2021	Tahunan
20	Kecamatan Rancaekek Dalam Angka 2021	Tahunan
21	Kecamatan Majalaya Dalam Angka 2021	Tahunan
22	Kecamatan Solokan Jeruk Dalam Angka 2021	Tahunan

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
23	Kecamatan Ciparay Dalam Angka 2021	Tahunan
24	Kecamatan Baleendah Dalam Angka 2021	Tahunan
25	Kecamatan Arjasari Dalam Angka 2021	Tahunan
26	Kecamatan Banjaran Dalam Angka 2021	Tahunan
27	Kecamatan Cangkuang Dalam Angka 2021	Tahunan
28	Kecamatan Pameungpeuk Dalam Angka 2021	Tahunan
29	Kecamatan katapang Dalam Angka 2021	Tahunan
30	Kecamatan Soreang Dalam Angka 2021	Tahunan
31	Kecamatan Kutawaringin Dalam Angka 2021	Tahunan
32	Kecamatan Margaasih Dalam Angka 2021	Tahunan
33	Kecamatan Margahayu Dalam Angka 2021	Tahunan
34	Kecamatan Dayeuhkolot Dalam Angka 2021	Tahunan
35	Kecamatan Bojongsoang Dalam Angka 2021	Tahunan
36	Kecamatan Cileunyi Dalam Angka 2021	Tahunan
37	Kecamatan Cilengkrang Dalam Angka 2021	Tahunan
38	Kecamatan Cimenyan Dalam Angka 2021	Tahunan
39	Perilaku Masyarakat Kabupaten Bandung pada Masa PPKM Darurat	-

Lampiran 7. Piagam Penghargaan yang diterima Tahun 2021

1. Piagam penghargaan **Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Softcopy Dan Hardcopy) Paling Awal Periode Triwulan I (Januari, Februari, Maret) Tahun Anggaran 2021**. Diberikan oleh KPPN Bandung II pada tanggal 12 April 2021.



2. Piagam penghargaan sebagai **Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021**. Diberikan oleh BPS Pusat pada tanggal 12 Juli 2021



3. Piagam penghargaan ***Pencapaian Sebagai BPS Kabupaten/Kota Dengan Sampel Terbanyak Dan Selesai Tepat Waktu Dalam Menyelesaikan Rangkaian Kegiatan Survei Industri Mikro Dan Kecil Tahunan***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 19 Oktober 2021.



4. Piagam penghargaan ***Pencapaian Sebagai BPS Kabupaten/Kota Dengan Sampel Terbanyak Dan Selesai Tepat Waktu Dalam Menyelesaikan Rangkaian Kegiatan Listing***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 1 November 2021



5. Piagam Penghargaan **Satker Terbaik Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 milyar rupiah**. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2021



6. Piagam Penghargaan **Satker Terbaik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 Miliar Rupiah**. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2021



7. Piagam Penghargaan **Satker Terbaik Bidang Statistik Sosial Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 Milyar Rupiah**. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2021



8. Piagam penghargaan sebagai **Unit Kerja Dengan Manajemen Dan Output Terbaik Dalam Program 100 Desa Cinta Statistik Tahun 2021**. Diberikan oleh BPS Pusat pada tanggal 6 Desember 2021.



9. Piagam penghargaan sebagai **Peringkat II Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Tahun Anggaran 2021**. Diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II pada tanggal 31 Januari 2022.



DATA

Mencerdaskan Bangsa



BPS Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang Km. 17

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Soreang

Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Telp. 022 5895905 Fax. 022 5889882 Email. bps3204@bps.go.id

Homepage. <https://bandungkab.bps.go.id>